

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.35/MENHUT-II/2012 TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT MELINDUNGI DAN MELESTARIKAN
TAMAN NASIONAL UJUNG KULON**

T E S I S

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi: Hukum Kebijakan Publik



oleh:

YOGA FERNANDES

NIM. S311302011

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Indonesia termasuk yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Indonesia dengan hutan dan ekosistem lainnya, merupakan negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati pada urutan kedua setelah Brazil, sehingga menempatkan negara tersebut sebagai negara *megabiodiversitas* dan *mega center* keanekaragaman hayati dunia¹. Hutan Indonesia merupakan tempat tinggal berbagai macam spesies dan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama manusia di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sekitar 90-100 juta hektar hutan Indonesia merupakan bio-ekosistem yang telah memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sumber pendapatan masyarakat pedesaan dan penyediaan layanan berbasis lingkungan. Akan tetapi, pengelolaan hutan Indonesia tidak dilakukan secara berkesinambungan. Selama dua dekade terakhir, 1-2 juta hektar hutan telah hilang melalui degradasi lahan dan perluasan area tanam minyak sawit, kopi, coklat, karet dan tanaman budidaya lainnya². Atas data tersebut perlu langkah-langkah yang tepat dalam mengelola hutan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut sebagaimana dirilis oleh Bank Dunia antara lain³:

1. Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Hutan.

¹ Danang D Cahyadi, Hutan Indonesia: Kekayaan dan Kompleksitas Masalah, Bogor - 22 Maret 2014, <http://www.greenpeace.org/>

² The World Bank, Pengelolaan Hutan bagi Semua: Indonesia Policy Briefs - Ide-Ide Program 100 Hari, diakses 23 April 2014, <http://siteresources.worldbank.org/>

³ *Ibid.*

2. Menjadikan Hutan sebagai Sumber Daya Berkelanjutan bagi Pengembangan Ekonomi.
3. Memanfaatkan Hutan sebagai Penunjang Sumber Kehidupan Daerah Perdesaan.
4. Melindungi Pelayanan Lingkungan.
5. Transparansi dalam Informasi Kehutanan dan Pengembangan Hutan.

Langkah-langkah pengelolaan hutan sebagaimana disebutkan di atas memerlukan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi dan dioptimalkan adalah terkait dengan penyuluhan kehutanan. Hal ini penting karena program penyuluhan kehutanan merupakan cara yang mampu memberikan transparansi dalam informasi kehutanan dan pengembangannya kepada masyarakat yang menjadi salah satu sasaran dalam pengelolaan dan perbaikan hutan di Indonesia.

Penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan para pihak lainnya dalam pembangunan kehutanan, merupakan investasi untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya hutan sebagai aset negara. Oleh karena itu penyuluhan kehutanan memiliki peran strategis, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, maupun dalam upaya pelestarian sumber daya hutan. Dua hal penting yang menjadi ciri penyuluhan kehutanan adalah penguatan kelembagaan dan pendampingan ke arah masyarakat mandiri yang berbasis pembangunan kehutanan⁴.

Proses penyuluhan kehutanan diharapkan dapat menjadi suatu upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara memfasilitasi proses dalam merefleksikan permasalahan masyarakat, potensi dan lingkungan serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara proporsional. Karena itu pula diharapkan penyuluh kehutanan bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam

⁴ IPKINDO, Penyuluhan Kehutanan, diakses 23 April 2014, [https://www.facebook.com/pages/](https://www.facebook.com/pages/Penyuluhan-Kehutanan/)
[Penyuluhan-Kehutanan/](https://www.facebook.com/pages/Penyuluhan-Kehutanan/)

pembangunan kehutanan, akan tetapi penyuluh kehutanan harus terus menerus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha/kegiatan berbasis masyarakat⁵.

Peran penyuluhan kehutanan berada di Penyuluh Kehutanan. Kementerian yang membawahi penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS maupun penyuluh swadaya adalah Kementerian Kehutanan. Penyuluh kehutanan ditempatkan di beberapa unit kerja Kementerian Kehutanan seperti di taman-taman nasional dan balai-balai konservasi sumber daya alam, salah satunya di Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

Kawasan Taman nasional Ujung Kulon secara administratif terletak di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedangkan untuk Balai Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Kecamatan Labuan. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan Taman nasional ini juga memasukan wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil disekitarnya seperti Pulau Handeuleum dan Pulau Peucang. Taman ini mempunyai luas sekitar 122.956 Ha; (443 km² di antaranya adalah laut), yang dimulai dari tanjung Ujung Kulon sampai dengan Samudera Hindia. Taman Nasional ini menjadi Taman Nasional pertama yang diresmikan di Indonesia, dan juga sudah diresmikan sebagai salah satu Warisan Dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991, karena wilayahnya mencakupi hutan lindung yang sangat luas.

Di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, para penyuluh diharapkan dapat lebih maksimal dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan terkait hutan di kawasan ini. Permasalahan yang terjadi seperti kasus penjarahan dan pembalakan liar. Kasus penjarahan cukup banyak terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon, terutama di Wilayah Sumur eks wilayah hutan Perum Perhutani yang telah diserahkan ke Taman Nasional

⁵ Iskandar, Hasan Almutahar, dan M. Sabran, Kajian Sosiologis terhadap Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013*, hlm. 2.

Ujung Kulon pada tahun 1992. Pada wilayah tersebut masih terdapat penduduk yang pada saat dikelola Perum Perhutani merupakan masyarakat penggarap program tumpangsari. Umumnya pencurian kayu dilakukan oleh penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Pemerintah secara bertahap berupaya untuk memindahkan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2004, telah ditangani 7 kasus pencurian kayu liar di taman nasional yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia (*World Heritage Site*) oleh UNESCO pada tahun 1991. Sedangkan pada tahun 2003 berhasil ditangani dan diproses hukum sebanyak 12 kasus yang meliputi kasus pencurian kayu dan pencurian biota laut. Namun vonis pengadilan atas kasus-kasus tersebut dirasakan belum memuaskan karena para tersangkanya hanya dihukum paling berat 6 bulan penjara.

Tidak hanya permasalahan terkait penjarahan dan pembalakan liar, di Taman Nasional Ujung Kulon juga masih terjadi perburuan liar terhadap satwa-satwa yang dilindungi, seperti pada Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*). Dalam kurun dua bulan, yaitu dari bulan mei sampai juni 2010, ditemukan tiga ekor badak yang mati. Dari hasil pemeriksaan tulang-belulang yang ada, didapati bahwa cula badak tersebut telah hilang, dan ini merupakan sebuah indikasi yang kuat bahwa praktek perburuan liar di kawasan hutan konservasi masih terjadi. Inilah peran penyuluh kehutanan agar, kasus-kasus seperti penulis sampaikan di atas tidak terjadi lagi. Edukasi terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan sangat penting dalam pencegahan atas kemungkinan-kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak kita harapkan.

Agar lebih memaksimalkan peran penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, kinerjanya perlu berlandaskan pada pedoman-pedoman yang dapat diukur dan ditinjau secara nyata. Salah satu pedoman tersebut terkait dengan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan sebagaimana telah disinggung di bagian awal. Pedoman tersebut ada dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui apakah kegiatan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah berdasar dan sesuai dengan pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. Penulis membahas topik ini karena belum pernah penulis temukan sebuah penelitian terkait dengan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, yang penulis temukan adalah sebuah penelitian yang hanya melihat secara spesifik bagaimana peranan penyuluh kehutanan dalam memberdayakan masyarakat di daerah tertentu. Penelitian yang dimaksud adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Iskandar, Hasan Almutahar, dan M. Sabran dengan judul “Kajian Sosiologis terhadap Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau”. Atas dasar kebaruan tema penelitian inilah, penulis bermaksud mengangkat sebuah tesis dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melindungi dan Melestarikan Taman Nasional Ujung Kulon”.

B. Rumusan Masalah

Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berasal dan berangkat dari masalah⁶. Masalah tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta tercapainya sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan lebih mendalam. Ada pun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 25.

1. Apakah pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012?
3. Apa saja alternatif solusi atas hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012?

C. Tujuan Penelitian

Pastilah ada tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang dihadapi⁷. Senada dengan pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai sebagai pemecahan masalah atas isu hukum yang ada dan telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian juga harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012.
3. Untuk memberikan alternatif solusi atas hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat diabaikan adalah mengenai manfaat penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu bagi penulis, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Ada pun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kehutanan pada khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan penyuluhan kehutanan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁸. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, and rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, dan mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁹.

Pokok pandangan keadilan ini adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995 hlm. 196.

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa¹⁰. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat¹¹.

b. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan¹². Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹¹ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹² Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140.

menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)¹³.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan di dasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”¹⁴.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik¹⁵.

Menurut Rawls keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi. Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu:

- 1) Dimana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama.
- 2) Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.

- 3) Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Dalam hal ini John Rawls banyak berbicara tentang keadilan di bidang ekonomi.

Pokok pikiran yang ketiga dalam peran keadilan tersebut di atas menyangkut bidang kehidupan sosial ekonomi, yaitu adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan. Dalam hal ini makna keadilan sebagai *fairness* bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas.

Teori Keadilan John Rawls menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh John Locke, Rousseau dan I. Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Beberapa gagasan penting tentang keadilan sebagai *fairness* antara lain sebagai berikut¹⁶:

- 1) Prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.
- 2) Prinsip keadilan sebagai *fairness* adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali (*original position*) ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.
- 3) Posisi asali (*original position*) berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial, yaitu situasi hipotetis yang mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Contoh bentuk keadilan

¹⁶ Fadhilah, Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, *Jurnal Madani Edisi II/November 2007*, hlm. 40.

sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal dan sama-sama netral. Dalam posisi asali ini diasumsikan tak seorang pun tahu tempatnya, posisi/status sosialnya dalam masyarakat, termasuk kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dll dalam distribusi asset serta kekuatan alam.

- 4) Keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang fair antar individu dalam posisi asali (yang rasional dan sama-sama netral).
- 5) Keadilan sebagai *fairness* menolak prinsip utilitas yang menerima struktur dasar hanya karena memaksimalkan keuntungan tanpa mengindahkan efek-efek permanennya pada kepentingan dan hak dasarnya. Hal ini karena prinsip utilitas tidak konsisten dengan konsepsi kerjasama sosial bagi keuntungan bersama.
- 6) Kerjasama sosial harus bisa menjamin kepuasan hidup, termasuk dalam hal pembagian keuntungan bagi kelompok/golongan masyarakat yang paling tidak beruntung.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya¹⁷.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan bagi tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif¹⁸.

Selaku aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan¹⁹.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen²⁰:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan²¹.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan keadilan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa²². Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut²³.

2. Teori Penerapan Hukum

Soerjono Soekanto²⁴ menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

²¹ *Ibid.* hlm. 16.

²² *Ibid.*

²³ Lihat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 15.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Abddurahman²⁵ senada dengan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan berlakunya undang-undang atau peraturan yaitu:

- a. Faktor peraturan hukumnya sendiri baik yang menyangkut sistem peraturannya dalam arti sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang mendukung pelaksanaan peraturan yang bersangkutan dan substansi atau isi dari peraturan tersebut.
- b. Faktor pelaksana dan penegak hukum yang disertai tugas untuk melaksanakan peraturan tersebut.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut.
- d. Faktor masyarakat dan budaya setempat banyak mempengaruhi pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan. Keempat faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman²⁶ menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

²⁵ *Ibid*, hlm. 3.

- a. *legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
- b. *legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
- c. *legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemban empat fungsi, yaitu²⁷:

- a. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku;
- b. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
- c. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*;

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York, 1969, hlm. 16.

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 41.

- d. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemeliharaan status quo yang tidak menginginkan perubahan.

3. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

George C. Edwards III menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah “*what government say and do, or not to do*”²⁸. Bahkan David Eastern mengemukakan bahwa “*policy is the authoritative allocation of value for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa dan atau sah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para pakar aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit²⁹.

Thomas R Dye menjelaskan, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu harus mencakup seluruh tindakan pemerintah. Sedangkan jika pemerintah tidak memilih untuk melakukan sesuatu, maka tetap akan disebut kebijakan publik, karena akibat yang ditimbulkan sama besar dengan akibat yang ditimbulkan dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah³⁰.

Menurut Andersen dan Dye, analisis atau pembelajaran terhadap suatu kebijakan publik tersebut dilakukan karena alasan profesional (*professional reason*) yang dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, PT Buku Seru, Jakarta, 2012, hlm 18.

²⁹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 39.

³⁰ *Ibid*, hlm. 21.

ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari³¹.

Analisis suatu kebijakan publik juga sering menggunakan alat-alat konseptual (*conceptual tools*) tertentu yang dimaksud untuk membantu pekerjaan dalam memahami dan memvisualisasikan realita kebijakan publik yang kompleks. Di antara sejumlah alat-alat konseptual yang ada, maka yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis adalah yang berupa model-model atau tipologi-tipologi tertentu³².

Menurut Thomas R. Dye terdapat enam buah model analisis kebijakan publik, yaitu³³:

- a. Model Kelembagaan
Kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok pada umumnya terkonsentrasi dan tertuju pada lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut model kelembagaan ini ditetapkan, disahkan, dilaksanakan, dan dipaksakan berlakunya oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut.
- b. Model Kelompok
Kebijakan publik dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok. Kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah suatu kelompok yang mempunyai kesamaan sikap yang mendesak tuntutan-tuntutan tertentu terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- c. Model Elit
Kebijakan publik dipandang sebagai preferensi elit, yaitu bahwa kebijakan publik adalah cerminan dari kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elit yang berkuasa.
- d. Model Rasional
Kebijakan publik dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien. Pembuatan keputusan yang rasional pada hakikatnya mencakup pemilihan alternatif terbaik yang akan memaksimalkan tingkat kepuasan nilai-nilai pembuatan keputusan.
- e. Model *Incremental*
Kebijakan publik dipandang sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kebijakan publik pada

³¹ Solichin Abdul Wahab, *Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 9.

³² *Ibid*, hlm. 72-73.

³³ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 50.

intinya kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

f. Model Sistem

Kebijakan publik dipandang dari *output* sebuah sistem. Dipelopori oleh Easton, yang mengatakan bahwa kegiatan politik dianalisis dari sudut pandang sederhana gejala-gejala politik (*political phenomena*), serta untuk mengelompokkan proses kebijakan ke dalam sejumlah tahapan yang berbeda-beda yang masing-masing tahapan itu dapat pula dianalisis secara lebih terperinci.

Adapun hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari pembentukan hukum dan formulasi publik, implementasi dan evaluasi, menurut Bambang Sunggono dapat diuraikan sebagai berikut³⁴:

- a. Proses pembentukan kebijakan publik berasal dari realitas masyarakat, realitas tersebut berupa aspirasi yang berkembang dari masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Proses selanjutnya mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan sekarang. Sebenarnya antara hukum dan kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan tidak sekadar keterkaitan yang ada di antara keduanya, pada sisi-sisi yang lain justru lebih banyak kesamaannya. Proses pembentukan hukum hasil akhirnya lebih difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan dalam bentuk undang-undang.
- b. Penerapan hukum membutuhkan kebijakan publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada di masyarakat, sebab apabila responsivitas aturan masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum semata, maka bukan tidak mungkin pada suatu saat akan terjadinya pemaksaan-pemaksaan yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin menyejahterakan masyarakat. Penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada kebijakan publik sebagai sarana yang dapat mensukseskan berjalannya penerapan hukum. Adanya kebijakan publik pemerintah pada level yang terdekat dengan masyarakat setempat akan mampu merumuskan apa-apa saja yang harus dilakukan agar penerapan hukum yang ada pada suatu saat dapat berjalan dengan baik.

³⁴ *Ibid*, hlm. 63.

- c. Hubungan hukum dan kebijakan dalam hal evaluasi dapat dilakukan peradilan administrasi dan evaluasi kebijakan publik. Apabila pada kenyataannya masyarakat tidak puas atau merasa dirugikan oleh proses penerapan hukum yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka peradilan administrasi akan menjalankan fungsinya. Evaluasi kebijakan publik berfungsi sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada apakah telah berjalan dengan sukses atau telah mengalami kegagalan mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan publik juga sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak diteruskan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Menurut Tjipto Atmoko³⁵, sesungguhnya penyusunan kebijakan publik sejak awal harus melibatkan masyarakat secara bersama-sama untuk menentukan arah kebijakan (*model bottom up*) sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis.

Kebijakan publik yang telah dibuat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga menjadi proses timbal balik. Fungsi kebijakan publik dalam hal ini untuk menandai lingkungan sekitar keputusan yang dibuat dan memberikan jaminan keputusan yang diambil serta mendukung tercapainya arah dan tujuan³⁶. Karena kebanyakan kebijakan publik yang dilahirkan terkesan sekedar *doing something* bukannya *problem solving*.

Menurut Yuzar Mat Karl³⁷, pada dasarnya suatu kebijakan haruslah didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah persepsi atau depersepsi beda oleh si pemakai maupun pelaksana kebijakan itu sendiri. Untuk itu secara psikologis ketentuan materi kebijakan haruslah mampu mencerminkan perilaku etis bagi pemakai dan pelaksana agar pada tataran operasional selalu dapat mempertahankan apa yang disebut dengan “kejujuran hati nurani”. Oleh sebab itu, dalam suatu kebijakan harus jelas menyebutkan tentang larangan, suruhan ataupun kewajiban terhadap

³⁵ Tjipto Atmoko, Partisipasi Publik (Public Participation) Dalam Konsep Pembangunan untuk Semua (Development for All), *Jurnal Sekretariat Negara RI*. No.16 Mei 2010, Jakarta, 2010, hlm 135.

³⁶ Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 14.

³⁷ Yuzar Mat Karl, Filosof, Pembuat Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8 No.I Desember 2005, Sumedang, hlm 50.

sesuatu secara tegas dan jelas, sehingga dapat dimengerti oleh semua orang dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan.

4. Teori Komunikasi Hukum

Stephen W. Littlejohn³⁸, seorang doktor dalam bidang komunikasi, mediasi, dan dialog dalam penyelesaian konflik mengatakan, Ada lima jenis teori dalam kelompok teori-teori umum, namun dimanfaatkan secara efektif dalam kancah-kancah komunikasi, yaitu:

a. Teori Fungsional dan struktural

Teori ini menjelaskan kategori-kategori umum dan hubungan di antara variabel-variabel dalam berbagai macam sistem. Teori-teori struktural memandang komunikasi sebagai proses dimana di dalamnya individu-individu menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna pada individu lainnya. Selain itu, bahasa dan sistem simbol yang digunakan dalam sistem komunikasi mempunyai dunia sendiri, terpisah dari orang yang menggunakannya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah teori-teori mengenai bahasa dan tanda-tanda, *semiotic*, teori struktur bahasa, teori komunikasi non verbal dan *discourse theory*.

Teori fungsional dalam organisasi dapat mengidentifikasi secara umum akibat dari sejumlah gaya pengelolaan seorang manajer dalam produktifitas kerja. Teori ini tidak membantu anda memahami perasaan karyawan (pekerja individu) tentang atasannya (manajernya) yang mungkin saja dirasakan oleh karyawan tersebut dan bagaimana cara manajer berinteraksi dengan karyawannya. Teori ini lemah dalam menggunakan nada dan warna dari peristiwa-peristiwa individual dan pengalaman-pengalaman khusus manusia.

Ciri dan jenis teori ini dibangun berdasarkan asumsi dasar teori, yaitu:

- 1) Masyarakat adalah organisme kehidupan;

³⁸ Littlejohn, Stephen W. & Karen A.Foss, *Theorie Of Human Communication*. 8 ed. Wadsworth, Canada, 2005.

- 2) Masyarakat memiliki subsistem-subsistem kehidupan;
- 3) Masing-masing subsistem memiliki fungsi yang berbeda;
- 4) Fungsi-fungsi subsistem saling memberi kontribusi kepada subsistem lainnya; dan
- 5) Setiap fungsi akan terstruktur dalam masyarakat berdasarkan fungsi masing-masing.

Meskipun pendekatan fungsional dan struktural ini sering kali dikombinasikan, namun masing-masing mempunyai titik penekanan yang berbeda. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Pendekatan fungsionalisme berasal dari biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara pengorganisasian dan mempertahankan sistem. Apabila ditelaah, kedua pendekatan ini sama-sama mempunyai penekanan yang sama yakni tentang sistem sebagai struktur yang berfungsi.

Menurut Littlejohn, kedua pendekatan ini juga memiliki beberapa persamaan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Baik pendekatan strukturalisme maupun pendekatan fungsionalisme, keduanya sama-sama lebih mementingkan *synchrony* (stabilitas dalam kurun waktu tertentu) dari pada *diachrony* (perubahan dalam kurun waktu tertentu).
- 2) Kedua pendekatan sama-sama mempunyai kecenderungan memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) daripada hasil-hasil yang sesuai tujuan. Kalangan strukturalis tidak memercayai konsep-konsep 'subjektivitas' dan 'kesadaran'. Bagi mereka yang diamati terutama sekali adalah faktor-faktor yang berada di luar kontrol dan kesadaran manusia.
- 3) Kedua pendekatan sama-sama mempunyai kepercayaan bahwa realitas itu pada dasarnya objektif dan independen (bebas). Oleh

karena itu, pengetahuan, menurut pandangan ini, dapat ditemukan melalui metode pengamatan (observasi) empiris yang cermat.

- 4) Pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme juga sama-sama bersifat dualistik, karena keduanya memisahkan bahasa dan lambang dari pemikiran-pemikiran dan objek-objek yang disimbolkan dalam komunikasi. Menurut pandangan ini, dunia hadir karena dirinya sendiri, sementara bahasa hanyalah alat untuk mempresentasikan apa yang telah ada.
- 5) Kedua pendekatan juga sama-sama memegang prinsip *the correspondence theory of truth* (teori kebenaran yang sesuai). Menurut teori ini bahasa harus sesuai dengan realitas. Simbol-simbol harus memprestasikan sesuatu secara akurat.

b. Teori *Behavioral* dan *cognitive*

Teori behavioral dan kognitif merupakan gabungan dari dua tradisi yang berbeda. Asumsinya tentang hakikat dan cara menemukan pengetahuan juga sama dengan aliran strukturalis dan fungsional. Perbedaan utama antara aliran behavioral dan kognitif dengan aliran strukturalis dan fungsional hanya terletak pada fokus pengamatan serta sejarahnya. Dalam teori behavioral kognitif, komunikasi dipahami dalam *term* pemikiran individual manusia, dengan kata lain komunikasi dipandang sebagai manifestasi dan tingkah laku, proses berfikir dan “fungsi *bio-neural*” dari individu. Oleh karenanya, variabel-variabel penentu yang memegang peranan penting terhadap sarana kognisi seseorang (termaksud bahasa) berada di luar kontrol atau kesadaran tersebut. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah teori-teori pembentukan pesan, *constructivism theory*, serta teori-teori penerimaan dan pengelolaan pesan, seperti teori atribusi, kognitif disonansi, dan teori konsistensi.

Teori-teori behavioral dan kognitif juga mengutamakan analisis variabel (*variable-analytic*). Analisis ini pada dasarnya merupakan upaya mengidentifikasi variabel-variabel kognitif yang dianggap

penting, serta mencari hubungan korelasi di antara variabel. Analisis ini juga menguraikan tentang cara-cara bagaimana variabel-variabel proses kognitif dan informasi menyebabkan atau menghasilkan tingkah laku tertentu.

c. Teori Konvensional dan interaksional

Teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Komunikasi, menurut teori ini, dianggap sebagai alat perekat masyarakat (*the glue of society*). Kelompok teori ini berkembang dari aliran pendekatan 'interaksionisme simbolis' (*symbolic interactionism*) sosiologi dan filsafat bahasa *ordiner*.

Bagi kalangan pendukung teori-teori ini, pengetahuan dapat ditemukan melalui metode interpretasi. Berbeda dengan teori-teori strukturalis yang memandang struktur sosial sebagai penentu, teori-teori *interaksional* dan *konvensional* melihat struktur sosial sebagai produk dari interaksi. Fokus pengamatan teori-teori ini tidak terhadap struktur, tetapi tentang bagaimana bahasa dipergunakan untuk membentuk struktur sosial serta bagaimana bahasa dan simbol-simbol lainnya direproduksi, dipelihara, serta diubah dalam penggunaannya.

Makna, menurut pandangan kelompok teori ini, tidak merupakan suatu kesatuan objektif yang ditransfer melalui komunikasi, tetapi merupakan suatu kesatuan objektif yang ditransfer melalui komunikasi, tetapi muncul dari dan diciptakan melalui interaksi. Dengan kata lain, makna merupakan produk dan interaksi. Menurut teori-teori interaksional dan konvensional, makna pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh dari interaksi. Oleh karena itu, makna dapat berubah dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks, serta dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya. Dengan demikian, sifat objektivitas dari makna adalah relatif dan temporer.

Teori interaksionis dibuat untuk menemukan proses sosial dan untuk memperlihatkan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh norma-norma dan aturan-aturan kelompok. Teori ini juga menunjukkan bagaimana komunikasi dapat mengubah konvensi sosial. Menurut teori-teori ini komunikasi dianggap sebagai alat perekat masyarakat, di mana bahasa dipergunakan untuk membentuk struktur sosial dan bagaimana bahasa serta simbol-simbol lainnya direproduksi, dipelihara serta diubah dalam penggunaannya. Kekuatan dari teori ini adalah penggambaran dan penjelasan tentang dinamisme dan hubungan antar pribadi. Kekuatan lainnya adalah dalam mengekspresikan cara orang dan kelompok berubah dari satu situasi ke situasi lain, dan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Akan tetapi teori ini lemah dalam mengungkapkan struktur kehidupan manusia yang ditemukan dalam berbagai situasi. Contohnya, teori interaksional bisa memperlihatkan bagaimana konsep diri anda sendiri berubah dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, tergantung dari nilai-nilai dan aturan-aturan kelompok dimana anda berada. Tetapi teori ini tidak dapat membantu anda dalam memahami karakter kepribadian anda yang abadi. Teori-teori yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, teori mengenai realitas sosial dan budaya, teori relativitas linguistik safir, teori-teori simbolik interaksionisme dari Blumer dan Mead.

d. Teori Kritis

Teori kekritisan menekankan nilai-nilai atau keinginan untuk menilai atau mengkritik peristiwa-peristiwa, situasi-situasi dan institusi-institusi. Teori-teori kritis memusatkan perhatian pada konflik kepentingan dalam masyarakat dan bagaimana komunikasi mengabaikan dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah teori Marxist, Habermas, dan *Cultural Feminist Theory*.

Beberapa teori dapat menjadi agen perubahan yang kuat dimana aliran yang lainnya tidak. Tetapi teori penafsiran dan teori

kekritisan tidak sesuai dalam membuat pernyataan ilmiah tentang hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antar manusia. Contohnya teori kekritisan bisa membantu seorang peneliti menganalisa cara berbicara dari beberapa kelompok dan mengungkapkan pengaruhnya dalam menekan kelompok lain dalam suatu masyarakat yang luas. Beberapa teori juga berkesimpulan tentang perubahan institusi yang diperlukan untuk mengurangi dan menghapuskan tekanan. Di lain pihak, teori ini tidak memberitahukan kita tentang proses umum persuasi dan bagaimana hal itu bekerja.

Meskipun ada beberapa perbedaan di antara teori-teori yang termasuk dalam kelompok ini, namun terdapat dua karakteristik umum. *Pertama*, penekanan terhadap peran subjektivitas yang didasarkan pada pengalaman individual. *Kedua*, makna atau *meaning* merupakan konsep kunci dalam teori-teori ini. Pengalaman dipandang sebagai *meaning centered* atau dasar pemahaman makna. Dengan memahami makna dari suatu pengalaman, seseorang menjadi sadar akan kehidupan dirinya. Dalam hal ini bahasa menjadi konsep sentral karena bahasa dipandang sebagai kekuatan yang mengemudikan pengalaman manusia. Di samping persamaan umum, juga terdapat perbedaan yang mendasar antara teori-teori kritis dalam hal pendekatannya.

e. Teori Interpretatif

Teori-teori interpretatif mencoba mengungkapkan makna dalam tindakan dan teks. Teori-teori ini menguraikan proses terjadinya pemahaman. Tujuan interpretasi adalah untuk mengungkapkan bagaimana cara orang-orang secara aktual memahami pengalaman mereka. Teori ini memiliki kekuatan dalam mengungkapkan hakikat dari pengalaman individu dan struktur sosial.

Teori ini menganggap bahasa sebagai pusat dari pengalaman dan percaya bahwa menciptakan dunia makna tempat orang hidup di dalamnya dan memahami semua pengalaman karenanya. Yang

termaksud dalam kelompok ini antara lain teori-teori interpretasi studi fenomenologi, hermeneutika, interpretasi budaya, interpretasi tekstual dan etnografi komunikasi.

Pendekatan teori interpretatif cenderung menghindarkan sifat-sifat preskriptif dan keputusan-keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Pengamatan (*observation*) menurut teori interpretatif, hanyalah sesuatu yang bersifat tertatif dan relatif. Sementara teori-teori kritis (*critical theories*) lazimnya cenderung menggunakan keputusan-keputusan absolut, preskriptif, dan juga politis sifatnya.

Teori-teori komunikasi yang ada perlu dibahas lagi terkait efektifitas dan efisiensinya jika diterapkan dalam proses penyuluhan kehutanan di Indonesia. Penyuluhan kehutanan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 130/Kep/M.PAN/2002 diartikan sebagai proses pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau, dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Dalam penyuluhan kehutanan, komunikasi yang dibangun melibatkan kelompok sasaran (kelompok sasaran utama dan kelompok sasaran usaha), penyuluh dan narasumber, lembaga penyuluhan, lembaga penelitian, dan lembaga teknis lainnya. Dalam komunikasi terkait penyuluhan kehutanan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu³⁹:

- 1) Penyampaian materi diusahakan tidak bias terhadap isi/subyek.
- 2) Fokus utama yang disampaikan adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Materi disampaikan sesuai dengan tingkat kemampuan penerimanya.
- 4) Penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan tidak bertumpuk.

³⁹ Modul Diklat Komunikasi dalam Penyuluhan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Bogor, Desember 2012, hlm. 45.

- 5) Memikirkan hubungan antara materi baru yang diberikan dengan materi lama yang pernah diperoleh.
- 6) Kelompok sasaran diminta untuk menunjukkan/merespon pencapaian hasil belajarnya agar dapat diukur oleh penyuluh.
- 7) Memberikan waktu yang cukup untuk berlatih.
- 8) Menggunakan media yang sesuai dengan konteks materi yang disampaikan.

Telah dipaparkan beberapa hal terkait penyuluhan kehutanan dan bagaimana membangun komunikasi di dalamnya, maka selanjutnya kita tentukan teori mana yang paling sesuai dengan konsep komunikasi penyuluhan kehutanan. Dari penjelasan yang disampaikan terkait komunikasi penyuluhan kehutanan, menurut penulis teori konvensional dan interaksional adalah teori yang sesuai dengan komunikasi penyuluhan kehutanan. Ini karena dalam teori tersebut disebutkan bahwa kehidupan ini merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep penyuluhan yang membangun dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat, memelihara jika dikaitkan dengan bagaimana masyarakat mampu memelihara kelestarian lingkungannya untuk keberlangsungan kehidupan, serta akhirnya terjadi perubahan-perubahan yang dikehendaki seperti adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

5. Tinjauan tentang Penyuluhan Kehutanan

a. Penyuluh dan Penyuluhan Kehutanan

Menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 130 Tahun 2002 Pasal 1 yang dimaksud dengan penyuluh kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. Sedangkan menurut Wiharta dkk⁴⁰, istilah

⁴⁰ Wiharta. M. dkk, *Buku Pintar Penyuluh Kehutanan*. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta, 1997, hlm. 13.

penyuluh dapat diartikan sebagai seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan yang berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang atau masyarakat sasaran penyuluhan untuk menerapkan suatu inovasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 56 ayat 1, disebutkan bahwa:

Penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

Ini berarti di dalam kegiatan penyuluhan kehutanan harus ada penyampaian informasi, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, ide-ide baru serta keterampilan agar masyarakat desa mengetahui dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan hidupnya melalui pengelolaan sumberdaya alam yang ada di sekitar desa. Agar masyarakat dapat mengetahui, mempunyai kemauan dan dapat memahami serta dapat mengelola sumberdaya hutan, memerlukan suatu perubahan yang terencana dan terprogram secara berkesinambungan.

b. Peran Penyuluh Kehutanan

Menurut Keputusan Menteri PAN nomor 130 tahun 2002 peran atau tugas pokok penyuluh kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan. Sedangkan menurut Wiharta, dkk⁴¹ dalam menjalankan penyuluhan, tenaga penyuluh memegang peran yang sangat menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan, karena penyuluh sebagai agen pembangunan atau

⁴¹ *Ibid.* hlm. 14.

agen perubahan. Kartasapoetra⁴² dalam kaitan peran penyuluh ini menyatakan untuk dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik dan berhasil seorang penyuluh harus dapat sekaligus berperan sebagai pendidik/ guru, pemimpin dan penasehat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Sebagai pendidik/guru* seorang penyuluh harus dapat memberikan pengetahuan atau cara-cara baru (inovasi) dalam meningkatkan produksi dan sekaligus taraf hidup masyarakat.
- 2) *Sebagai pemimpin*, seorang penyuluh harus dapat membimbing dan memotivasi masyarakat sasaran penyuluhan agar mau mengubah cara berpikir dan cara kerja sehingga mau dan mampu menerapkan cara-cara baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 3) *Sebagai penasehat*, seorang penyuluh harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk memilih alternatif perubahan yang tepat, yang secara teknis dapat dilaksanakan dan secara ekonomis menguntungkan. Selain itu seorang penyuluh harus dapat berperan melayani, memberi petunjuk dan contoh dalam bentuk peragaan (mengerjakan sendiri) dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi.

Wiharta dkk⁴³, menambahkan, selaras dengan peran penyuluh kehutanan, maka setiap penyuluh kehutanan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Kemampuan Berkomunikasi
- 2) Memiliki sikap
- 3) Memiliki Kemampuan Pengetahuan dan atau Keahlian
- 4) Karakter Sosial Budaya Penyuluh

Onong⁴⁴ menyatakan peran dari penyuluh kehutanan adalah bagian dari tindakan komunikasi yang dipengaruhi oleh berbagai

⁴² Kartasapoetra, *Konservasi Tanah Dan Air*, Rineke Cipta, Bandung, 2005, hlm. 181.

⁴³ Wiharta, *op cit*, hlm 15.

faktor dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Pendidikan formal dan non formal akan memberikan kemampuan untuk merumuskan konsep yang hendak disampaikan, pengalaman memberikan warna pribadi yang khas terhadap isi pesan (*field of experience*), lingkungan sosial menentukan nilai-nilai yang mengatur hubungan komunikator (penyuluh) dan komunikan (masyarakat Hutan) namun pengaruh yang paling menentukan dalam memberikan konteks terhadap peristiwa komunikasi adalah datangnya dari faktor kebudayaan (sandi, lambang dan cara yang berkembang dalam budaya masyarakat).

Muljono⁴⁵ mengemukakan, penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara dan upaya mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya Muljono⁴⁶ menjelaskan pula kriteria keberhasilan penyuluh kehutanan dalam proses pemberdayaan masyarakat berupa:

Terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Selanjutnya dijelaskan indikator yang mencirikan telah terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri yaitu dengan kriteria; 1. Terbentuknya Kelompok Tani dengan SDM anggota masyarakat yang mantap; 2. Memiliki organisasi dan pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis; 3. Memiliki kemampuan manajerial dan kesepakatan/aturan adat yang ditaati bersama.

Hidayat⁴⁷ menyatakan ukuran keberhasilan penyuluh kehutanan secara sederhana adalah tumbuh dan berkembangnya kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) berbasis kehutanan

⁴⁴ Efendi Onong, *Ilmu komunikasi, teori dan praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1984, hlm. 23.

⁴⁵ Muljono, *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Kehutanan*, Badan Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 6.

⁴⁷ Hidayat, 2003. *Penyuluhan kehutanan. Akan Dibawa Kemana*, Pusat Penyuluhan Kehutanan, Jakarta, 2003, hlm. 5.

dan adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebagai mitra kerja penyuluh kehutanan dan kesepahaman masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pembangunan hutan dan kehutanan.

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyuluhan Kehutanan.

Selama lebih dari tiga dekade, sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain maupun pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum Undang-Undang No.41/1999 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus menganut asas manfaat dan lestari, kerakyatan, berkeadilan, kebersamaan, terbuka dan terpadu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pengelolaan sumberdaya hutan haruslah melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Pembangunan kehutanan ke depan diarahkan agar melibatkan peran serta masyarakat yang lebih besar. Salah satu upaya memberdayakan masyarakat sekitar adalah dengan memanfaatkan lahan hutan atau lahan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses atau upaya pemberdayaan semua masyarakat dengan peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kekuatan memecahkan masalahnya sendiri. Pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan kehutanan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, produktifitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat sebagai penggerak utama dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan.

Kegiatan penyuluhan kehutanan pada dasarnya adalah suatu proses pemberdayaan masyarakat selaku pelaku utama agar mereka mau dan mampu mandiri dan berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian hutan secara sistimatis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan upaya pemberdayaan

masyarakat melalui penyuluhan kehutanan diharapkan masyarakat mampu melakukan usaha-usaha di bidang pertanian dan kehutanan di lahan milik atau kawasan hutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya alam.

Penyuluhan kehutanan memiliki peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan, akan tetapi penyuluhan melakukan pendampingan masyarakat terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha berbasis kehutanan.

Penyuluhan kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya dan penguatan serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat betapa penting kelompok/kelembagaan yang kuat, yang pada akhirnya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama dan jaring kerja antara masyarakat itu sendiri di dalam kelompok/lembaga. Dalam upaya pengembangan kelembagaan haruslah tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, bukan kelembagaan yang terbentuk untuk kepentingan instansi pembina.

Terbentuknya dan berkembangnya kelompok/lembaga masyarakat yang kuat dapat terlihat dengan terbentuknya kelompok tani dengan sumber daya anggota yang mantap, memiliki pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis, dan mempunyai kemampuan manajerial, kesepakatan dan aturan yang ditaati bersama.

Peranan penyuluhan kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha berbasis kehutanan haruslah merupakan program pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus dan sistematis ditujukan kepada kelompok masyarakat. Berkembangnya kegiatan usaha di bidang kehutanan dengan manajemen yang lebih produktif dan efisien mencirikan telah terwujudnya kemandirian secara sosial dan ekonomi. Strategi

pendekatan dalam penyuluhan kehutanan dapat dilakukan melalui asistensi teknis pelatihan atau alih teknologi mulai dari pengkajian, penyusunan rencana, teknik budi daya, pengolahan hasil, keterampilan agrosilvobisnis dan memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan para pihak lainnya, antara lain dengan mengakses informasi teknologi dan pasar.

6. Tinjauan tentang Kelestarian Ekosistem

Definisi sederhana ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya⁴⁸. Hutan sebagai suatu ekosistem mencakup: (1) tumbuhan; (2) satwa; (3) tanah sebagai substrat tempat tumbuh; (4) mikroorganisme; dan (5) atmosfer. Jadi, hutan merupakan suatu sistem fisis dan biologis yang kompleks, yang di dalamnya ada banyak interaksi dan saling bergantung antarkomponen yang berbeda⁴⁹.

Interaksi antarkomponen ekosistem membentuk variasi hutan, di mana kondisi lingkungan yang berbeda akan membentuk hutan berbeda pula. Variasi hutan kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yang istilahnya tergantung pada sistem klasifikasinya. Menurut Spurr dan Barnes⁵⁰, hutan dunia dikelompokkan menjadi dua, yakni hutan tropis dan subtropis. Untuk hutan di Indonesia, Van Steenis mengelompokkan hutan menjadi hutan tropis dan *monsoon*. Kedua klasifikasi di atas lalu mengelompokkan tipe hutan secara lebih detil lagi menjadi beberapa tipe hutan. Beberapa di antaranya adalah hutan hujan pegunungan, hutan rawa, hutan mangrove, dan hutan kerangas.

Komponen-komponen ekosistem dikelompokkan menjadi enam atribut ekosistem, untuk mengetahui bentuk respons komunitas hutan terhadap lingkungannya, yaitu (1) komposisi, (2) struktur, (3) pola, (4)

⁴⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/ekosistem>

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Spurr, S. H., and B. V. Barnes. 1980. *Forest ecology*, 3d ed edition. John Wiley and Sons Inc., New York, NY.

heterogenitas, (5) fungsi, dan (6) dinamika dan *resilience*⁵¹. Heterogenitas sebagai salah satu atribut ekosistem umumnya dikenal dengan istilah biodiversitas. Definisi biodiversitas sangat beragam, namun pada intinya biodiversitas adalah variasi struktur dan fungsi organisme baik pada tingkatan genetik, populasi, komunitas, maupun ekosistem⁵². Dalam dimensi keterukuran, biodiversitas dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) *alpha diversity*; (2) *beta diversity*; (3) *gamma diversity*.

Konsep kelestarian hutan berevolusi tiga tahap, yaitu kelestarian produksi kayu, kelestarian multi-manfaat hutan, dan kelestarian ekosistem⁵³. Pertama, kelestarian hasil kayu (*sustained yield principles*) yang diartikan “pada tingkat intensitas pengelolaan hutan tertentu, hasil kayu yang diproduksi hutan berlangsung terus menerus”. Konsep kelestarian ini menekankan perencanaan hutan yang bertumpu pada keseimbangan pertumbuhan (*growth*) pohon dan pemanenan (*harvesting*). Pertumbuhan pohon sendiri bukanlah sesuatu yang mudah diketahui. Konsep kelestarian hasil kayu ini diterjemahkan dalam kaidah pengaturan hasil hutan (*forest yield regulation*). Penerapan konsep kelestarian hasil kayu di Indonesia diterapkan melalui beberapa sistem silvikultur, misalnya untuk pengelolaan hutan alam adalah Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), dan terakhir Silvikultur Intensif (Silint) yang sedang diujicoba pada beberapa unit manajemen hutan. Sementara, sistem silvikultur untuk hutan tanaman adalah Tebang Habis Permudaan Buatan.

Kedua, konsep kelestarian multi-manfaat hutan (*sustainability of multiple uses*) yang berasal dari pemahaman bahwa kayu bukanlah satu-satunya hasil hutan dan kebutuhan manusia terhadap hutan sangat

⁵¹ Hobbs, R. J. and Norton, D.A., 1996. Towards a conceptual framework for restoration ecology. *Restoration Ecology* 4(2): 93-110.

⁵² COX, E.J., Rose, D.T. & Lewis, J.M. 1997. Using laboratory culture experiments to explore the ecological tolerances of benthic diatoms. *Phycologia* 36(4) (Supplement): 22.

⁵³ Bettinger P, Boston K, Siry JP, Grebner DL. 2009. *Forest Management and Planning*. Amsterdam: Elsevier.

beragam. Dalam *Millennium Ecosystem Assessment* dijelaskan empat kategori jasa ekosistem hutan yang memberi beragam manfaat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning services*), jasa pengaturan (*regulating services*), jasa budaya (*cultural services*), dan jasa pendukung (*supporting services*).

Ketiga, konsep kelestarian ekosistem yang muncul dari konsep pengelolaan berbasis ekosistem (*ecosystem based management*). Konsep ini menjelaskan, aliran barang dan jasa dari hutan tergantung pada proses-proses yang melestarikan ekosistem. Jika konsep kelestarian hasil kayu dan multimanfaat menekankan pentingnya hasil atau manfaat dari hutan sebagai sebuah pabrik barang dan jasa, maka kelestarian ekosistem mementingkan pabrik itu sendiri.

Konsep kelestarian ekosistem hutan banyak disebut sebagai konsep kelestarian yang paling dibutuhkan saat ini, mengingat kondisi kerusakan ekosistem yang sudah pada tahap mengkhawatirkan. Dalam konteks kelestarian ekosistem hutan ini, para ahli ekosistem mengaitkannya dengan konsep kesehatan ekosistem hutan (*forest ecosystem health*). Konsep kesehatan ekosistem dipromosikan sebagai konsep yang akan membantu memperjelas, mengevaluasi, dan mengimplementasikan kebijakan ekologi. Ditinjau dari perspektif analisis sistem, konsep kesehatan ekosistem hutan dapat diartikan sebagai proses terciptanya suatu kondisi ekosistem hutan yang mampu mendukung ekosistem untuk memperbaharui dirinya sendiri secara alami, mempertahankan diversitas penutupan vegetasi, menjamin stabilitas habitat untuk flora dan fauna, serta terbentuknya hubungan fungsional di antara komunitas tumbuhan, hewan, dan lingkungan.

Kolb⁵⁴ mengusulkan, hutan sehat dibedakan oleh empat atribut kualitatif:

⁵⁴ Kolb, T., M. Wagner, and W. Convington. 1994. Concepts of forest health. *Journal of Forestry* 92:10–15

- a. Lingkungan fisik, sumber daya biotik, dan jaringan makanan atau nutrisi untuk mendukung hutan yang produktif setidaknya selama beberapa tahap sere (transisi) dalam suksesi ekosistem hutan.
- b. Resistensi terhadap perubahan katastrofik dan/atau kemampuan untuk pulih dari perubahan katastrofik pada tingkat lanskap.
- c. Keseimbangan fungsional antara penyediaan dan tuntutan kebutuhan terhadap sumber daya yang esensial (air, nutrisi, cahaya, ruang tumbuh, dll) untuk bagian-bagian utama vegetasi.
- d. Keanekaragaman dari tahap sere dan struktur tegakan yang menyediakan habitat yang layak untuk berbagai spesies asli dan seluruh proses ekosistem yang esensial.

Posisi manusia dalam ekosistem selalu menjadi bahasan menarik. Pada tataran konsep, keberadaan manusia dipetakan sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem. Oleh karena itu, konsep kelestarian ekosistem berkembang menjadi konsep kelestarian ekosistem dan nilai-nilai sosial (*sustainability of ecosystem and social values*). Kajian tentang bagaimana hubungan manusia dengan ekosistem atau seringkali disebut dengan istilah *social-ecological system* dilihat dari tiga atribut, yakni *resilience*, *adaptability*, dan *transformability*.

Resilience adalah kapasitas sistem untuk menyerap gangguan dan mengenalinya saat menjalani perubahan sehingga masih dapat mempertahankan fungsi dan struktur dasarnya. *Adaptability* adalah kapasitas aktor dalam sistem untuk mempengaruhi *resistence*. Adapun *transformability* adalah kemampuan menciptakan sistem baru secara fundamental, ketika struktur ekologis, ekonomi, dan sosial yang ada tidak dapat dipertahankan⁵⁵. Keadaan ini hanya akan terjadi jika gangguan pada ekosistem melebihi ambang batas kemampuan ekosistem mempertahankan dan memperbaharui diri (*maximum disturbance*).

⁵⁵ Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. 2004. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. *Ecology and Society* 9(2): 5.

B. Penelitian yang Relevan.

1. Jurnal, 2013, Iskandar, Hasan Almutahar, dan M. Sabran, Kajian Sosiologis terhadap Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. Program Studi Sosiologi, Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penelitian ini mengungkapkan dan menganalisis Peran Penyuluh Kehutanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Desa Tunggul Boyok. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyuluh berperan terhadap perubahan pengelolaan hasil panen madu alam, budidaya tanaman gaharu dan karet lokal masyarakat melalui terbentuknya 9 kelompok tani. Strategi pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat diarahkan dan disesuaikan dengan potensi spesifik lokal. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan berupa upaya nyata masyarakat melestarikan hutan dan hasil hutan, tradisi dan saksi adat melindungi jenis pohon Tapang, adanya tradisi pengari, keterbukaan masyarakat terhadap informasi, inovasi dan ide-ide baru. Faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat berupa: kondisi jalan yang belum memadai, perladangan berpindah yang masih dilakukan sebagian masyarakat, letak desa di dalam kawasan hutan, kurangnya tenaga penyuluh kehutanan di Kabupaten Sanggau, dan adanya kebijakan pemerintah di era otonomi yang tidak menjadikan program penyuluhan kehutanan sebagai prioritas bagi pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Diperlukan dukungan nyata yang terprogram dari pemerintah Kabupaten Sanggau dan pihak terkait untuk peningkatan prasarana jalan desa, pengadaan pelatihan bagi masyarakat desa, revisi tata ruang kawasan hutan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan berupa penambahan guru yang aktif bertugas di Sekolah Dasar Desa Tunggul Boyok.

Perbedaan penelitian di atas dengan penulisan tesis ini adalah penulis mengkaji bagaimana sebuah peraturan yang khusus terkait dengan pemanfaatan sarana penyuluhan diterapkan atau dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan dalam mencapai tujuan penyuluhan yang diinginkan. Perbedaan lain adalah lokasi penelitian ini spesifik di wilayah Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon yang pengelolaannya diserahkan kepada kementerian Kehutanan, dan bukan secara umum di masyarakat. Selain itu penelitian di atas lebih melihat pada bagaimana penyuluh dapat memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan, bukan bagaimana menjadikan kegiatan penyuluhan itu seharusnya berjalan.

2. Tesis, 2013, Andik Sumarsono, Penanggulangan Kejahatan Pemukiman Ilegal di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini fokus pada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan kejahatan pemukiman ilegal di Taman Nasional Baluran dan usaha-usaha apa saja yang diambil dalam upaya penanggulangan kejahatan pemukiman ilegal tersebut. Faktor-faktor yang disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah bahwa a) aturan hukum terkait kehutanan yang tidak mampu menanggulangi permasalahan yang ada ketika berhadapan dengan permasalahan lain seperti sejarah, sosial, ekonomi, dan politik, b) kualitas dan kuantitas aparat yang tidak sesuai dengan taman nasional yang begitu luas, c) fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung penegakan hukum belum maksimal, d) kepatuhan masyarakat yang masih rendah karena pendidikan, pengetahuan, dan kesejahteraan yang juga masih rendah, e) pemerintah daerah setempat yang masih mengizinkan mereka tinggal.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Andik Sumarsono lebih mengkaji sisi hukum pidana dan penegakannya terhadap permasalahan pemukiman ilegal di taman nasional Baluran, sedangkan penulisan tesis ini lebih mengedepankan

terhadap sisi analisis kebijakan khususnya terkait dengan penyuluhan kehutanan.

3. Tesis, 2012, Francisca Budyanti Suryaningsih, Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/MENHUT-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, dalam Pengelolaan Zona Inti Taman Nasional Karimunjawa, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Manajemen taman nasional harus mampu menjaga keseimbangan tiga komponen utama fungsi dari sebuah taman nasional, yaitu fungsi perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut diperlukan sebuah pembagian yang jelas dalam konsep wilayah atau zonasi. Salah satu zona yang dimaksud adalah zona inti. Zona ini terlarang untuk setiap kegiatan, yang dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai ilmiah, pendidikan, dan budaya dari zona tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Francisca ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/MENHUT-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, dalam Pengelolaan Zona Inti Taman Nasional Karimunjawa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa obyek peraturan yang dikaji berbeda. Penelitian Francisca menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/MENHUT-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, dalam Pengelolaan Zona Inti Taman Nasional, sedangkan penelitian ini menganalisis Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

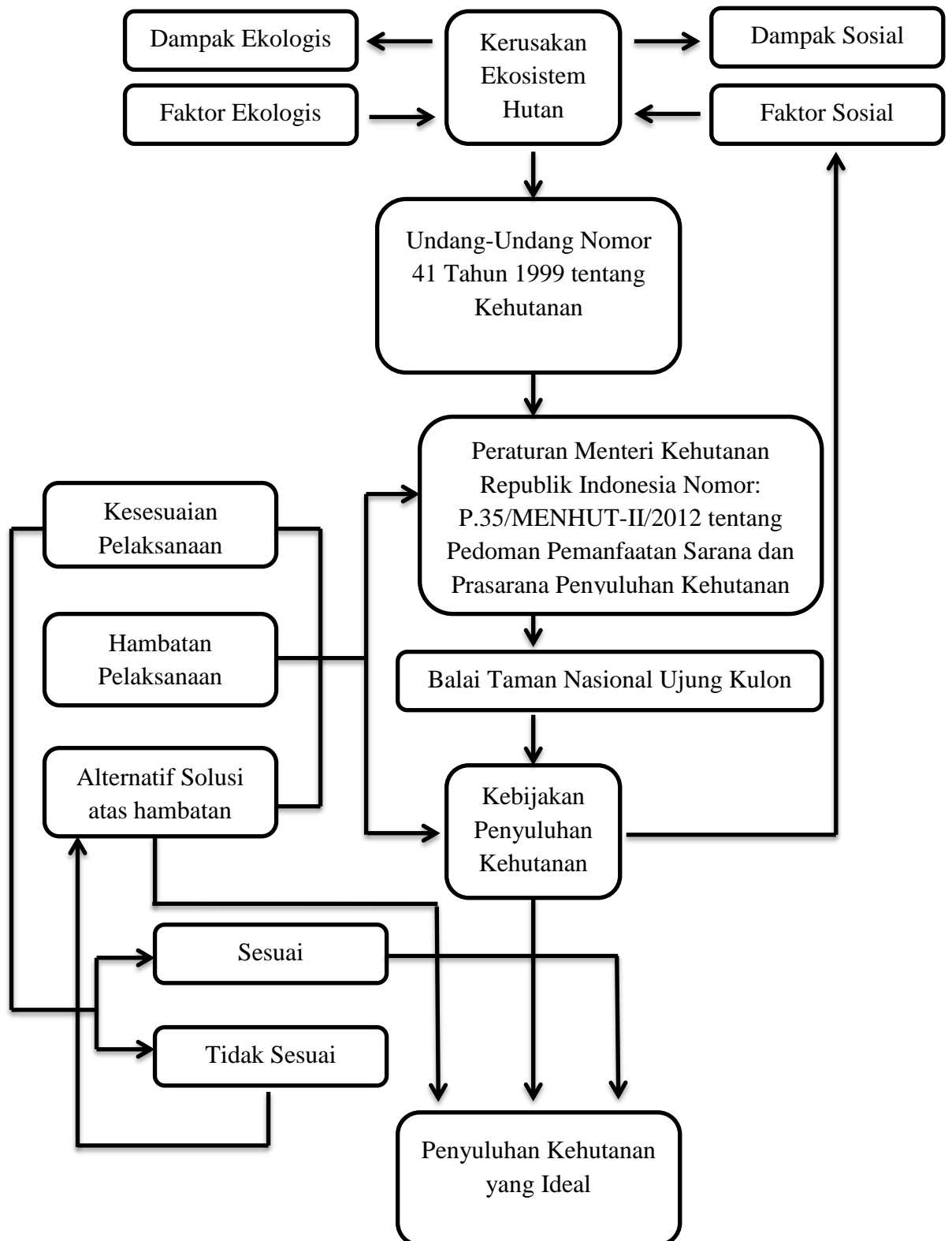
4. Tesis, 2013, Lukman Hidayat, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan Liar di Taman Nasional Gunung Merbabu, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan solusi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perburuan liar di gunung merbabu. Permasalahan yang muncul adalah a)

aturan terkait perburuan liar yang masih lemah, b) kekurangan baik secara kualitas maupun kuantitas dari aparat yang ada, c) fasilitas yang belum menunjang penegakan hukum, d) ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan yang ada, e) adanya budaya masyarakat yang bertentangan dengan penegakan hukum.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hidayat dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut mengkaji dari sisi penegakan hukum pidana terhadap permasalahan perburuan liar di Taman Nasional Gunung Merbabu, sedangkan penelitian ini mengkaji pengimplementasian sebuah kebijakan, bukan penegakan hukum pidana. Kebijakan tersebut juga bukan terkait perburuan liar, melainkan terkait penyuluhan kehutanan, khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon.

C. Kerangka Pikir.



Gambar 1. Kerangka Pikir.

Keterangan:

Kerusakan ekosistem hutan merupakan sebuah permasalahan yang serius dan nyata untuk dihadapi. Kerusakan ini utamanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekologis dan faktor sosial. Kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh faktor ekologis biasanya berupa ketidakmampuan alam untuk menjaga keseimbangan ekologi dan bisa juga berupa bencana alam. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh faktor sosial, utamanya terjadi karena kesengajaan dari masyarakat atau orang perseorangan yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak ekosistem tersebut, contohnya seperti melakukan penebangan hutan secara ilegal. Selain faktor kesengajaan, hal lain dari faktor sosial yang dapat merusak ekosistem adalah karena ketidaktahuan masyarakat atas apa yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya tidak bermaksud untuk merusak ekosistem, namun secara tidak langsung tindakan-tindakan yang mereka lakukan justru bisa digolongkan dalam perusakan ekosistem. Contohnya seperti melakukan perburuan terhadap hewan-hewan yang dilindungi atau membangun pemukiman di kawasan-kawasan yang sebenarnya dilarang.

Ketidaktahuan tadi perlu untuk segera ditanggulangi oleh pihak-pihak terkait agar kerusakan-kerusakan pada ekosistem tidak bertambah buruk. Salah satu upayanya adalah dengan mengedukasi masyarakat akan pentingnya kelestarian ekosistem. Edukasi tersebut bisa berupa penyuluhan, khususnya penyuluhan kehutanan karena yang menjadi obyek adalah ekosistem hutan.

Kerusakan ekosistem hutan berdampak pula pada dua faktor, yaitu faktor ekologis dan faktor sosial. Dampak pada sisi ekologis seperti terjadinya ketidakseimbangan hayati. Sedangkan dari sisi sosial, dampak kerusakan ekosistem hutan bisa berupa hilangnya sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup dari hutan.

Di Indonesia, banyak upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem hutan. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk seperangkat aturan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan pada hutan di negara ini. Aturan utama dalam perlindungan

hutan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini merupakan ketentuan pokok dari upaya perlindungan hutan di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur mengenai kebijakan penyuluhan kehutanan (sebagai fokus utama dalam penelitian ini). Ketentuan mengenai penyuluhan kehutanan dalam Undang-undang ini terus diimplementasikan sampai pada tingkat Peraturan Menteri, dan salah satu Peraturan Menteri Kehutanan terkait penyuluhan kehutanan adalah Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan. Permenhut ini mengatur urusan teknis bagaimana kebijakan penyuluhan kehutanan seharusnya dilakukan.

Kebijakan penyuluhan kehutanan diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan di unit-unit kerjanya, seperti di Taman Nasional. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK). Kebijakan dan kegiatan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dilakukan oleh Kelompok Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang bertanggungjawab kepada Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

Penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012. Dan juga akan meneliti hambatan apa saja yang ada dari pelaksanaan penyuluhan tersebut. Setelah itu penulis akan memberikan alternatif solusi atas hambatan yang timbul dari pelaksanaan penyuluhan tersebut. Alternatif solusi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan yang konstruktif demi terwujudnya sebuah kebijakan penyuluhan kehutanan yang ideal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu⁵⁶. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Metode adalah alat untuk mencari jawab⁵⁷. Suatu penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian diperlukan suatu metode yang tepat untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penilaian karena mutu, nilai, dan validasi suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitian yang tepat. Ada pun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengkajian hukum terlebih dahulu. Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto yang diuraikan oleh Burhan Ashofa⁵⁸, ada lima macam konsep hukum, yakni sebagai berikut:

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 42.

⁵⁷ Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 19.

⁵⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 10.

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim (*in concreto*) dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Sedangkan tipe kajiannya *sociological jurisprudence*.
4. Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, tipe kajiannya sosiologi hukum.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Tipe kajiannya sosiologi dan/atau sosial.

Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga, dalam literatur-literatur sering disebut sebagai konsep-konsep normatif. Dalam konsep ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituedum*) atau pun norma yang telah terwujud sebagai perintah dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*). Maka penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma disebut penelitian doktrinal.

Selanjutnya konsep keempat dan kelima merupakan konsep normologik. Menurut Burhan Ashofa, hukum di sini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi interaksi. Penelitian hukum ini disebut penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Metode penelitian hukum yang demikian disebut metode non-doktrinal⁵⁹. Jika dilihat konsep hukum yang keempat merupakan metode penelitian sosial non-doktrinal, dengan pendekatan struktural (makro) dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)⁶⁰.

Dari uraian tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris, dengan menggunakan konsep hukum yang keempat yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 34.

⁶⁰ Setiono, *op cit.* hlm. 23.

sebagai variabel sosial yang empiris, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal dan menggunakan analisis metode kuantitatif.

B. Bentuk Penelitian

Penelitian menurut bentuknya ada tiga, yaitu⁶¹:

1. Penelitian *Diagnostik* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala.
2. Penelitian *Preskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.
3. Penelitian *Evaluatif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

Bentuk penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian *Evaluatif*, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012.

C. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian dibedakan menjadi⁶²:

1. Penelitian yang bersifat *Deskriptif*. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian *Deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.
2. Penelitian yang bersifat *Eksplanatif* (menerangkan). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 6.

⁶² *Ibid.* hlm. 5-6.

3. Penelitian yang bersifat *Eksploratif* (penjajakan atau penjelelahan). Penelitian *Eksploratif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila dilihat dari sifatnya penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian eksplanatif. Dalam penulisan hukum ini, penulis bertujuan untuk menerangkan se jelas mungkin mengenai pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, apakah telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012 atau belum.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di:

1. Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten.
2. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan RI.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
4. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
5. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan atau fakta langsung dan segera diperoleh dari sumber-sumber data di lapangan. Data ini diperoleh di Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

- b. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer melalui bahan kepustakaan, majalah, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pihak yang terkait secara langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu: Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data yang mempunyai hubungan yang erat dan secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana yang telah diketahui, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu studi dokumen dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu⁶³. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat *depth interview* (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu

⁶³ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 186.

menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait yaitu Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kehandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas)⁶⁴. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan dengan mengamati gejala yang diteliti berupa informasi tambahan tentang pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Dengan menggunakan panca indera, peneliti dapat menangkap gejala yang diamati kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

3. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Suatu metode untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan teknik analisis data berupa model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan melalui suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan saling berhubungan satu dengan yang lain dan benar-benar merupakan data yang mendukung penulisan penelitian⁶⁵. Ketiga tahap tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

⁶⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52.

⁶⁵ HB. Soetopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 37.

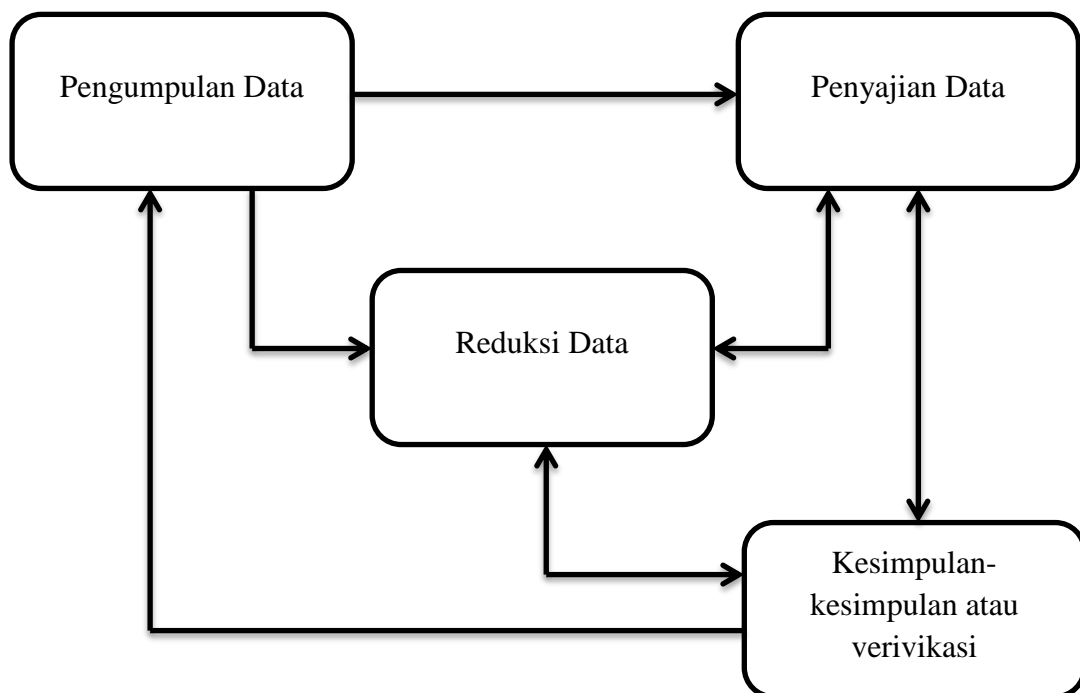
Mereduksi data ditujukan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data, serta mengatur sedemikian rupa sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Merupakan berbagai informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan atau tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat⁶⁶.



Gambar 2. Model Analisis Interaktif.

⁶⁶ *Ibid.* hlm 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

a. Latar Belakang Filosofis, Normatif, dan Sosiologis Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

1) Latar Belakang Filosofis

Falsafah diartikan sebagai suatu pandangan hidup, atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan diterapkan dalam perilaku atau kehidupan sehari-hari. Dengan dasar pemikiran seperti itu, maka falsafah penyuluhan adalah sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dalam bahasa praktis di lapangan, penyuluhan merupakan upaya membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sedemikian rupa agar pada akhirnya mereka mampu mengatasi segala masalah yang akan dihadapi di masa depan.

Dalam penyelenggaraan penyuluhan, di Amerika Serikat dikembangkan falsafah 3-T yaitu *Teach, Truth, and Trust* (pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan/keyakinan), artinya,

penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan perkataan lain, dalam penyuluhan, misalnya dalam penyuluhan kepada para petani dididik untuk menerapkan setiap informasi dan atau teknologi baru yang telah diuji kebenarannya dan diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Dalam penyuluhan, ada tiga falsafah pokok yang harus dipegang yaitu⁶⁷:

- (a) Penyuluhan merupakan proses pendidikan
- (b) Penyuluhan merupakan proses demokrasi
- (c) Penyuluhan merupakan proses yang terus menerus

Falsafah penyuluhan merupakan proses pendidikan, dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pada dasarnya kelakuan/perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan dan sikap mentalnya. Dengan adanya penyuluhan, maka pengetahuan, kecakapan dan sikap mental masyarakat akan mengalami perubahan, yang berarti kelakuan/perilaku dan bentuk kegiatannya pun akan berubah.

Di samping itu, falsafah ini dilandasi juga oleh suatu pemikiran bahwa apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu harus mau belajar, berusaha mencari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun belajar dari pengalaman orang lain. Berkaitan dengan falsafah penyuluhan sebagai proses pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya yaitu sebagai berikut⁶⁸:

- (a) Agar masyarakat mau dan dapat belajar dengan baik, maka kegiatan penyuluhan harus diusahakan agar:

⁶⁷ Hazanal Arifin, dkk, *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan* (edisi ketiga), Departemen Kehutanan, Jakarta, 2004, hlm. 15.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 16.

- (1) Segala sesuatu yang disampaikan dalam penyuluhan harus menarik minat yaitu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapinya atau berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya/keinginannya.
 - (2) Segala sesuatu yang disampaikan dalam penyuluhan harus nyata kegunaannya dan dapat diyakini keberhasilannya.
 - (3) Menggunakan alat peraga yang tepat agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap segala sesuatu yang disampaikan dalam penyuluhan.
 - (4) Tepat memilih waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan.
- (b) Agar masyarakat tersuluh dapat dengan mudah memahami segala sesuatu yang disampaikan dengan penyuluhan, maka ada tiga unsur isi pelajaran (materi) yang selalu harus diuraikan dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu:
- (1) *To Know What*: pertama-tama tersuluh harus diberi tahu apa materi yang disampaikan, misalnya apa itu hutan rakyat, apa itu bibit unggul dan bagaimana pengelolaannya.
 - (2) *To Know Why*: masyarakat tersuluh harus diberi pemahaman mengapa materi yang disampaikan itu berguna.
 - (3) *To Know How*: akhirnya masyarakat tersuluh harus diajarkan bagaimana penerapannya di lapangan, sehingga mereka mampu mengerjakan sendiri tanpa bimbingan penyuluh atau orang lain.

Falsafah penyuluhan merupakan proses demokrasi, terkandung makna di dalamnya bahwa masyarakat tidak dapat dipaksa oleh penyuluh atau petugas agar mau menerima dan menerapkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh penyuluh. Mereka berhak memutuskan sendiri segala sesuatu yang

diterimanya berdasarkan pertimbangan yang rasional, kerjasama dan musyawarah.

Falsafah penyuluhan merupakan proses yang terus menerus, mengandung makna bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan tidak akan pernah berhenti selama ada manusia dan usahanya. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan zaman senantiasa membawa keadaan baru, seperti halnya dalam ilmu dan teknologi akan terus berkembang.

Di lain pihak penyuluhan pun akan mengalami perubahan-perubahan, terutama bentuk kegiatannya sebagai hasil penyempurnaan, yang ditujukan agar lebih efektif dan efisiensi. Dalam hal ini ada dua fase efektif bagi para penyuluh, yaitu⁶⁹:

- (a) Penyuluhan dalam fase ini hanya bersifat mendidik dengan memberi penjelasan, contoh, semangat dan arah pemikiran baru.
- (b) Selanjutnya berusaha agar yang terdidik berubah dari yang diurus menjadi orang yang dapat berdiri sendiri, tidak selalu tergantung pada pertolongan orang lain.

Berdasarkan landasan filosofis di atas, yang menyebutkan penyuluhan merupakan proses pendidikan, proses demokrasi, dan proses yang terus menerus, maka jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan terkait pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pertama, pada dasarnya sarana dan prasarana terkait dengan proses pembelajaran dan pendidikan. Akan sulit dalam proses pendidikan masyarakat jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dalam penyuluhan kehutanan. Kedua, terkait penyuluhan merupakan proses demokrasi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung nilai-nilai dan proses demokrasi,

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 17.

terlebih lagi ketika masyarakat yg disuluh merupakan masyarakat yang demokratis. Ketiga, penyuluhan merupakan proses yang terus menerus. Untuk menjamin sebuah kegiatan berjalan dengan baik dan terus menerus perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan terjamin ketersediaannya guna menunjang kegiatan yang intensitasnya cukup tinggi seperti penyuluhan. Hal ini dimaksudkan agar penyuluhan tidak berhenti di satu tahapan saja karena sarana dan prasarana yang kurang atau tidak tersedia, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses penyuluhan secara keseluruhan.

2) Latar Belakang Normatif

Landasan Pembangunan Kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengelolaan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu: (1) perencanaan hutan; (2) pengelolaan hutan; (3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan; dan (4) pengawasan dan pengendalian.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan,

pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan pengaturan tata air dan udara.

Pada konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Seiring dengan pergeseran pembangunan kehutanan, penyuluhan kehutanan juga mengalami pergeseran, dari penyuluhan yang lebih menekankan pada transfer ilmu dan teknologi kepada penyuluhan pemberdayaan masyarakat. UU 16 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari pengelolaan hutan sentralistik dengan titikberat pada kayu sebagai sumberdaya hutan (*timber based management* dan *state based management*) menjadi pengelolaan hutan yang memberikan ruang gerak kepada komunitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan mengembangkan seluruh sumberdaya hutan (*forest resources based management* dan *community based forest management-CBFM*). Berkaitan dengan CBFM, dimana masyarakat berada di bawah naungan pemerintahan desa, maka desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam pemerintahan

Indonesia, menjadi elemen penting dalam pembangunan kehutanan.

Guna melandasi program-program pembangunan kehutanan sebagaimana telah disinggung di atas, diperlukan sebuah landasan normatif untuk memenuhi aspek legalnya. Program-program pembangunan kehutanan, termasuk juga penyuluhan juga memerlukan landasan normatif dalam pelaksanaannya. Undang-undang tentang Kehutanan yang ada sudah memberikan landasan yang jelas untuk itu, termasuk ketika memberikan landasan untuk pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. Lebih jauh lagi, landasan terkait pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3) Latar Belakang Sosiologis

Sektor kehutanan pada dasarnya mempunyai manfaat sosial yang sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang bergantung pada keberadaan hutan. Ketergantungan tersebut dapat dilihat secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat sosial secara langsung ditunjukkan oleh banyaknya hasil-hasil hutan baik kayu maupun non kayu (rotan, damar, gaharu, lebah madu, dan sebagainya) yang menjadi gantungan hidup sebagian besar masyarakat di sekitar hutan. Sedangkan manfaat sosial secara tidak langsung ditunjukkan oleh adanya keseimbangan lingkungan keberadaan hutan yang berdampak sosial antara lain: terjaganya sumber air, mencegah terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lainnya). Selain itu keberadaan sektor kehutanan (dari hulu ke hilir) telah membuka kesempatan/lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Jumlah jiwa yang tergantung pada sektor kehutanan

baik langsung maupun tidak langsung diperkirakan mencapai 30 juta orang⁷⁰.

Atas dasar pentingnya hutan bagi masyarakat tersebut, maka perlu untuk selalu memberikan edukasi terkait dengan kelestarian hutan agar selalu memberikan manfaat-manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan tersebut. Edukasi tersebut dapat diberikan melalui penyuluhan kehutanan secara baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan untuk menunjang maksud dari edukasi terhadap masyarakat tersebut, dan memastikan bahwa manfaat-manfaat dari hutan yang ada dapat dinikmati dan digunakan guna sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat di sekitar kawasan hutan.

- b. Substansi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Maksud pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan adalah sebagai acuan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana minimal dalam penyuluhan kehutanan. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyuluhan kehutanan dalam melaksanakan penyuluhan kehutanan yang efektif dan efisien. Ada pun ruang lingkup dari pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan ini adalah:

- 1) Jenis sarana dan prasarana;
- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- 3) Pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- 4) Pembiayaan.

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan terdiri dari jenis sarana prasaran untuk penyuluh kehutanan tingkat terampil dan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 3.

penyuluh kehutanan tingkat ahli. Jenis sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan tingkat terampil antara lain meliputi:

- 1) pakaian kerja, yang terdiri atas baju, celana, topi, sepatu dan jas hujan;
- 2) tas kerja;
- 3) buku kerja;
- 4) peta kerja;
- 5) kamera digital;
- 6) alat perekam suara;
- 7) *global positioning system* (GPS);
- 8) kompas;
- 9) komputer jinjing (notebook);
- 10) kalkulator;
- 11) *soil tester*;
- 12) pita meter;
- 13) *hagameter*;
- 14) teropong;
- 15) kendaraan roda dua; dan/atau
- 16) unit percontohan.

Sedangkan jenis sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan tingkat ahli antara lain meliputi:

- 1) pakaian kerja, yang terdiri atas baju, celana, topi, sepatu dan jas hujan;
- 2) tas kerja;
- 3) buku kerja;
- 4) peta kerja;
- 5) kamera digital;
- 6) alat perekam suara;
- 7) *global positioning system* (GPS);
- 8) kompas;
- 9) komputer jinjing (notebook);

- 10) kalkulator;
- 11) kendaraan roda dua; dan/atau
- 12) unit percontohan.

Sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan seperti yang telah disebutkan seperti di atas, dimanfaatkan untuk:

- 1) memperlancar kegiatan penyuluhan kehutanan.
- 2) memfasilitasi proses pembelajaran dan penerapan teknologi baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- 3) meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh kehutanan.
- 4) mengakses informasi teknologi, pasar, permodalan dan informasi lainnya.
- 5) memperlancar kegiatan pelaporan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan dapat dimanfaatkan oleh penyuluh PNS Pusat dan daerah melalui mekanisme izin. Izin pemanfaatan sarana dan prasarana diberikan oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dalam hal pengadaannya dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. Izin pemanfaatan sarana dan prasarana diberikan dalam bentuk surat keputusan tentang Penunjukan penanggung jawab dan pengguna/pemakai sarana dan prasarana penyuluhan.

Pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan berada. Penyuluh kehutanan wajib memelihara, mengamankan, serta wajib melaporkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan kepada masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan berada.

Terkait dengan pembiayaan, sumber pembiayaan untuk pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara,

anggaran pendapatan dan belanja daerah baik provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengalokasian pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan masing-masing.

2. Kebijakan Penyuluhan Kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon.

a. Dasar Hukum Kebijakan Penyuluhan Kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ada pun landasan hukum terkait dengan kebijakan penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Kehutanan.
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
- 6) Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Nomor: SK.320/Kpts/IV-T.10/Peg/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

b. Pelaksanaan dan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon.

Balai TN. Ujung Kulon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007, UPT taman nasional termasuk Balai TN. Ujung Kulon mempunyai tugas untuk menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyelenggarakan fungsi⁷¹:

- 1) penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional;
- 2) pengelolaan kawasan taman nasional;
- 3) penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman nasional;
- 4) pengendalian kebakaran hutan;
- 5) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 6) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 7) kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- 8) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional;
- 9) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- 10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain tugas pokok dan fungsi di atas, Balai TN. Ujung Kulon dalam pelaksanaannya didukung oleh visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Balai TN. Ujung Kulon. Adapun visi Balai TN. Ujung Kulon adalah terwujudnya fungsi TNUK sebagai Warisan Alam Dunia dan Kawasan Strategis Nasional yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan berlandaskan pada asas pelestarian ekosistemnya. Sedangkan misi Balai TN. Ujung Kulon, antara lain:

- 1) Memantapkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya mengembangkan populasi dan habitat Badak Jawa yang didukung oleh peran serta masyarakat dan para pihak sebagai kebanggaan masyarakat Banten.

⁷¹ Rencana Kerja (RENJA) Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun 2014.

- 2) Menyelenggarakan birokrasi yang ideal serta mengembangkan kemitraan dan pengelolaan secara partisipatif dalam rangka mewujudkan kawasan yang mantap secara legal formal dan diterima semua pihak.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, situs budaya dan sejarah, jasa lingkungan, wisata alam yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.
- 4) Meningkatkan upaya perlindungan hutan dan penegakan hukum yang didukung masyarakat setempat dalam rangka menekan laju kerusakan hutan serta menjamin fungsi dan daya dukung lingkungan TNUK.

Untuk mensukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi Balai TN. Ujung Kulon, maka perlu didukung program dan kegiatan yang baik. Adapun program yang disusun adalah Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. Program ini merupakan program Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang telah ditentukan oleh masing-masing Eselon I (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) untuk Unit Pelaksana Teknis yang ada di daerah. Program tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan, yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kegiatan-kegiatan pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam fungsi Balai Taman Nasional Ujung Kulon sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional.

1) Bina Cinta Alam.

Kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) kemah konservasi.

Bina Cinta Alam dengan kegiatan kemah konservasi dalam rangka pendidikan konservasi dan pengembangan wisata alam merupakan sarana pembelajaran yang bermuatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dari usia anak-anak, remaja, generasi muda dan masyarakat pada umumnya akan nilai-nilai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan tersebut terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dapat dilakukan untuk berbagai kepentingan antara lain wisata alam.

Pada akhir-akhir ini kawasan konservasi tersebut banyak mendapat tekanan dan gangguan antara lain perambahan dan perladangan liar dari masyarakat yang punya kepentingan atau dari para pengunjung yang melakukan vandalisme dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena terus meningkat dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor penyebab gangguan tersebut antara lain

adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat akan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Sebagai solusinya diharapkan dengan kegiatan bina cinta alam dapat tersampaikan pesan-pesan konservasi kepada masyarakat.

Di Balai TN. Ujung Kulon kemah konservasi dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2011. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 30-31 Mei 2011 dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang siswa dan pendamping perwakilan dari masing-masing sekolah yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Sumur. Kemah konservasi tersebut dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di kalangan generasi muda khususnya pramuka baik tingkat penggalang-SLTP maupun penegak-SLTA.

Kegiatan diawali dengan apel pembukaan yang diikuti oleh seluruh peserta dan tamu undangan baik dari staf SPTN III Sumur maupun dari pengurus Kwartir Ranting Kecamatan Sumur. Selanjutnya dilakukan *overview* oleh Plt. Kepala SPTN Wilayah III Sumur tentang Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon beserta potensi keaneragaman hayatinya. Selain itu, untuk mengenalkan lebih jauh tentang manfaat Taman Nasional Ujung Kulon peserta juga diberikan materi-materi seperti budidaya anggrek, identifikasi dan pengenalan jenis kupu-kupu, tanaman obat, penangkaran rusa dan pembibitan pohon.

Kegiatan kemah konservasi Balai Nasional Ujung Kulon ditutup dengan apel penutupan yang dihadiri oleh peserta, pendamping dan panitia. Di akhir acara ini, Plt. Kepala SPTN III Wilayah Sumur berpesan agar peserta sebagai

generasi muda dan penerus bangsa untuk selalu berfikir dan merenungkan semua pengetahuan yang didapat dalam kegiatan ini. Di samping itu yang terpenting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku konservasi, sehingga bumi ini tetap lestari⁷².

b) pendidikan konservasi.

Pendidikan konservasi adalah pendidikan yang mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, sikap dan cara berfikir, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya⁷³. Pendidikan Konservasi bertujuan untuk membentuk jiwa konservasionis yang memiliki sikap sadar terhadap lingkungannya. Sadar lingkungan diartikan sebagai bagian dari kesadaran diri yang bertumpu pada terbentuknya hubungan positif antara individu dengan lingkungan alam, sosial dan lingkungan yang telah terbentuk dengan memperhatikan keteraturan ekologi. Maksud diselenggarakannya pendidikan konservasi adalah *pertama*, menyebarluaskan pengetahuan tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, fungsinya untuk kehidupan manusia, akibat bagi manusia apabila sumber daya alam dan ekosistemnya ini rusak. *Kedua*, memberi pengertian mengapa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup manusia. *Ketiga*, memberi pengertian bahwa tugas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bukan semata-mata tugas pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, tetapi tanggungjawab semua masyarakat.

⁷²Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kemah Konservasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun 2011 <http://www.ujungkulon.org/berita/159-kemah-konservasi>, diakses 15 agustus 2014, 15.52.

⁷³ Djoko Setiono, *Pendidikan Konservasi*, Materi Pendidikan Konservasi Alam bagi Guru Sekolah Dasar di Sekitar Balai Taman Nasional Alas Purwo Angkatan 26 Banyuwangi, 18-19 Juli 2011. Hlm. 4.

Di Balai TN. Ujung Kulon kegiatan pendidikan konservasi dilakukan dengan memberikan materi-materi terkait konservasi ke sekolah-sekolah, khususnya yang berada di sekitar wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan konservasi ini diberikan kepada pihak-pihak, instansi-instansi maupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pendidikan konservasi yang pernah diberikan oleh Balai TN. Ujung Kulon sepanjang 2012 sampai sekarang adalah pada tanggal 18 Agustus 2014 bertempat di Ruang Audio Visual Balai Taman Nasional Ujung Kulon diberikan penyuluhan dan pendidikan konservasi kepada siswa-siswi SMK Negeri 3 Pandeglang terkait dengan Selayang Pandang Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan Konservasinya. Ada pun yang menyampaikan materi penyuluhan adalah Bapak Firmanto Noviar Suwanda, S.Hut., M.Si. dan Yoga Fernandes, S.H. yang merupakan Penyuluh Kehutanan Ahli di Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Sarana dan Prasarana yang digunakan adalah pakaian kerja, tas kerja, buku kerja, kamera digital, dan komputer jinjing.

c) Pembentukan dan Pembinaan Kader Konservasi.

Kekayaan keanekaragaman sumberdaya alam hayati yang dimiliki, tersebar di seluruh kawasan pelestarian alam dan suaka alam di seluruh Indonesia yang cenderung makin menurun akibat perlakuan manusia yang kurang memperhatikan aspek konservasi. Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut berperan serta dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya perlu dilaksanakan kegiatan

pembinaan cinta alam. Salah satu yang ditempuh adalah dengan Pembentukan Kader Konservasi⁷⁴.

Kader Konservasi merupakan unsur penting dalam pembinaan cinta alam karena merupakan unsur pelopor dan penggerak dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta diharapkan dapat berperan aktif bersama pemerintah dalam mewujudkan manusia yang sadar konservasi.

Perhatian pemerintah dalam bidang konservasi sumberdaya alam terus meningkat terutama setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta perlu upaya yang nyata guna mengimplementasikan hal tersebut.

Kader Konservasi telah terbentuk sejak tahun 1982 yang dari tahun ke tahun terus bertambah, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah cq. Kementerian Kehutanan di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia, juga Kader Konservasi yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah.

Arah kebijaksanaan pembentukan Kader Konservasi ialah agar anggota masyarakat yang berminat di bidang konservasi dapat menyalurkan minatnya melalui wadah yang resmi dan mendapatkan pendidikan serta latihan yang cukup memadai, sehingga mampu menjadi kader-kader konservasi yang memiliki kemandirian, Mampu mengembangkan kepekaan dan kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan di bidang konservasi sumberdaya

⁷⁴ Pedoman Pembentukan Kader Konservasi, Dirjen PHKA, Bogor, 2006, hlm. 1.

alam hayati dan ekosistemnya, dan Mampu menjadi motivator agar masyarakat peduli dan menghayati pentingnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya⁷⁵.

Hal lain setelah Pembentukan adalah Pembinaan Kader Konservasi. Pembinaan Kader Konservasi adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil dan berdaya guna untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan kader konservasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yaitu sebagai pelopor dan penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta berperan aktif dalam menumbuhkembangkan gerakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam di tengah-tengah masyarakat⁷⁶.

Kebijaksanaan pembinaan kader konservasi (dalam hal ini kebijaksanaan operasional) dijabarkan dalam bentuk program-program pembinaan. Program pembinaan kader konservasi disusun oleh UPT PHKA adalah sebagai program jangka menengah/jangka pendek dan berkesinambungan (berkelanjutan dan saling berhubungan). Program pembinaan disusun dalam rangka memberikan tuntunan/arrah penyelenggaraan pembinaan kader konservasi oleh UPT PHKA. Rencana program pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk kerangka acuan atau rencana kerja yang berisi jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi dan peserta, serta hal-hal yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembinaan kader konservasi. Pada setiap program pembinaan kader konservasi diharapkan dapat memuat hal-hal yang bersifat pengembangan disiplin pribadi, bakat, pengetahuan dan kemampuan tiap kader

⁷⁵ *Ibid*, hlm 3.

⁷⁶ Pedoman Pembinaan Kader Konservasi, Dirjen PHKA, Bogor, 2009, hlm. 4.

konservasi dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Beberapa program pembinaan yang dikembangkan meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan⁷⁷:

- (1) Peningkatan dan pembekalan pengetahuan dan kemampuan kader konservasi.
- (2) Pemberdayaan kader konservasi di masyarakat dalam kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (3) Kerjasama kemitraan kader konservasi baik dengan perseorangan (sesama kader) maupun kelompok/organisasi.
- (4) Penjenjangan kader konservasi (tingkat pemula, madya, utama) sebagai tindak lanjut kegiatan pembentukan kader konservasi.

Dengan program pembinaan ini, diharapkan kedepannya UPT PHKA dapat mempunyai arahan dalam mengetahui jumlah, keberadaan, kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kader konservasi dalam kegiatannya. Sehingga dapat diupayakan pemecahan permasalahan/hambatan serta dukungan baik sarana maupun prasarana kepada kader konservasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatannya.

Di Taman Nasional Ujung Kulon sendiri telah dibentuk Kader Konservasi sejak tahun 2013. Kader Konservasi tersebut dinamai Young Guardian Club Ujung Kulon. Dinamakan demikian agar kaum muda, khususnya para pelajar mampu menjadi garda perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Kader Konservasi yang tergabung di dalam Young Guardian Club (YGC) Ujung Kulon berjumlah 70 orang kader yang terdiri dari

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 8.

siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon seperti SMA Negeri 16 Pandeglang yang berada di Kp. Cibayoni Kec. Sumur, SMP Negeri 1 Kertajaya di Kec. Sumur, dan SMP Negeri 2 Tamanjaya di Kec. Sumur.

Bentuk pembinaan terhadap kader konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon adalah seperti mengikutsertakan kader-kader konservasi di kegiatan-kegiatan yang relevan dan terkait dengan konservasi, seperti kemah konservasi. Kegiatan kemah konservasi terbaru yang diselenggarakan untuk pendampingan dan pembinaan kader-kader konservasi Taman Nasional Ujung Kulon adalah keikutsertaan dalam kemah konservasi yang diadakan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Cidahu, Sukabumi pada tanggal 7-11 agustus 2014.

2) Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan MDK (Model Desa Konservasi). Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi sudah dilakukan sejak tahun 1993 oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional (TN) melalui pengembangan daerah penyangga. Karena hasilnya belum maksimal, maka sejak tahun 2006 pola pemberdayaan masyarakat tersebut dirubah melalui Model Desa Konservasi (MDK). Pembangunan MDK merupakan upaya konkrit pemberdayaan masyarakat disekitar dan didalam kawasan konservasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan kawasan konservasi. Pembangunan MDK meliputi 3 kegiatan pokok yaitu pemberdayaan masyarakat, penataan ruang/wilayah

pedesaan berbasis konservasi dan pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi.

Tujuan pembangunan MDK disekitar Kawasan Konservasi (KK) yaitu dari aspek ekologi/lingkungan, MDK dapat menyangga KK dari berbagai gangguan, memperluas habitat flora dan fauna yang ada di KK, menambah areal serapan air jika terletak dibagian hulu sungai, menangkai bencana alam berupa banjir, erosi, angin serta bencana lainnya. Dari aspek ekonomi, melalui MDK diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat, tercipta berbagai aktivitas masyarakat untuk menambah pendapatan, potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, dan diharapkan roda perekonomian pedesaan dapat berputar. Dari aspek sosial, dengan pemberdayaan masyarakat melalui MDK pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dapat meningkat, masyarakat diharapkan dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi, kesehatan masyarakat dapat meningkat karena kondisi lingkungan pedesaan yang sehat dan diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan berkurang⁷⁸.

Model Desa Konservasi (MDK) merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan berupa program pembangunan desa model di sekitar kawasan konservasi. Output utama dari program tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Balai Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan mulai mengembangkan Model Desa Konservasi di Desa Tamanjaya. Desa Tamanjaya merupakan salah satu desa di

⁷⁸ Pusat Informasi Kehutanan, Model Desa Konservasi (MDK) Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi (Siaran Pers Nomor: 62/PIK-1/2009), <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/5232>, diakses 23 agustus 2014, pukul 12:21.

daerah penyangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Selain karena posisinya yang berdekatan langsung dengan kawasan, desa Tamanjaya ditetapkan menjadi salah satu Model Desa Konservasi adalah karena keragaman sumberdaya alam dan sumber daya manusianya yang telah memberi ruang kepada masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian. Namun tidak hanya di Desa Tamanjaya saja dilaksanakan Model Desa Konservasi, tetapi juga di desa-desa lain yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon seperti Desa Ujungjaya, Kertajaya, dan Kertamukti.

Kegiatan Model Desa Konservasi di Desa Tamanjaya telah dilakukan sejak tahun 2009 dan diperkuat kembali pada tahun 2011. Kegiatan tersebut diawali dengan inventarisasi dan identifikasi potensi desa dan dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa pelatihan dan pembuatan demplot padi organik. Dengan ditetapkannya Desa Tamanjaya sebagai Model Desa Konservasi diharapkan Desa tersebut dapat menjadi contoh/model bagi desa lain di sekitarnya dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam aspek konservasi, sosial, ekonomi dan budaya. Tidak hanya pembuatan demplot padi organik, di Desa Tamanjaya juga dilakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan usaha pengelolaan Bahan Bakar Nabati Nyamplung, pembelajaran pengelolaan hutan partisipatif, peningkatan kompetensi pemandu melalui pelatihan interpretasi wisata alam, serta pembinaan usaha madu lebah berupa bantuan pengembangan usaha, evaluasi, dan pembinaan⁷⁹.

⁷⁹ Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Model Desa Konservasi di Desa Tamanjaya, <http://www.ujungkulon.org/berita/161-model-desa-konservasi>, diakses 23 agustus 2014, pukul 12:15.

Sedangkan untuk Desa Ujungjaya, Kertajaya, dan Kertamukti, kegiatan-kegiatan MDK antara lain Peningkatan Usaha Tradisional Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon (Ujungjaya), peningkatan kompetensi pemandu melalui pelatihan interpretasi wisata alam (Ujungjaya), Peningkatan Kapasitas Lembaga Konservasi Desa (LKD) berupa pembelajaran pengelolaan hutan partisipasif (Kertamukti), Pengembangan *Breeding Stock* Rusa berupa pembinaan kelompok dan pengembangan penangkaran (Kertajaya), Pengembangan penangkaran kupu-kupu berupa pembinaan kelompok dan pengembangan produk (Kertajaya), Pengembangan budidaya tanaman Anggrek dan Tanaman Hias (Kertajaya), dan Pengembangan budidaya Tanaman Obat (Kertajaya).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dilaksanakan dengan membentuk tim khusus pelaksana pada tahun 2009 yang terdiri dari petugas-petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tidak diserahkan secara definitif pelaksanaannya kepada kelompok fungsional tertentu Penyuluh Kehutanan karena alasan keterbatasan Sumberdaya Manusia Penyuluh di Balai Taman Nasional Ujung kulon.

Tabel 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Tahun 2010.

No	Nama Kegiatan	Desa Binaan			Jenis Bantuan
		Jumlah Desa	Nama Desa	Jumlah KK	
1	Pengembangan Pelestarian Rusa	1	Kerta jaya	-	Pembinaan kelompok

2	Pengembangan Penangkaran Kupu-kupu	1	Kerta jaya	-	Pembinaan kelompok, pengembangan produk
3	Monitoring Primata di Gn. Honje	2	Tamanjaya, ujungjaya	-	Pembinaan kelompok konservasi primata
4	Peningkatan Usaha sosial dan ekonomi masyarakat di daerah penyangga	10	Desa di sekitar TNUK	-	Pengarahan kewirausahaan, Pengembangan hasil usaha, Bantuan sosial keagamaan
5	Pendidikan Konservasi Lingkungan hidup SLTA	1	SMU 16 pandeglang	-	Pemberian materi konservasi lingkungan hidup
6	Pengembangan Model Desa Konservasi	2	Kertajaya, kertamukti	-	Pembentukan Lembaga Konservasi Desa,
7	Pengelolaan konservasi partisipatif	5	Tamanjaya Kertamukti Cibadak, Rancapinang, Kertajaya	-	pembinaan kelompok LKD, sosialisasi kelembagaan
8	Pengembangan Usaha Kecil di	-	-	4	Bantuan usaha ekonomi

	daerah penyangga				Kerajinan tangan dan industri rumah tangga
9	Peningkatan Kompetensi <i>Guide</i> Lokal	2	Tamanjaya, Ujungjaya		Pembinaan <i>guide</i> lokal
10	Pengembangan manfaat lebah madu	2	Tamanjaya, Ujungjaya		Pengarahan kelompok
11	Pengembangan Budidaya tanaman anggrek dan hias	1	Kertajaya		Pelatihan keterampilan usaha, perluasan demplot
12	Pengembangan Budidaya Tanaman Obat	1	Kertajaya		Pelatihan pengembangan produk dan pemasarannya
13	Penguatan Budaya Spiritual Masyarakat	20	Desa di sekitar TNUK		Bantuan sosial spiritual di 20 lokasi

Sumber: Statistik Balai Taman Nasional Ujung Kulon, 2010.

3. Kesesuaian antara Kebijakan Penyuluhan Kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Telah dijelaskan di bagian pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon bahwa kegiatan-

kegiatan penyuluhan di Taman Nasional Ujung Kulon adalah yang berkaitan dengan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional. Untuk bina cinta alam kegiatannya dijabarkan lagi dalam beberapa kegiatan, yaitu kemah konservasi, pendidikan konservasi, dan pembentukan dan pembinaan kader konservasi.

Pertama, penulis akan membahas mengenai kesesuaian Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan dengan kegiatan kemah konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan kegiatan kemah konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2011. Hal ini tentu tidak relevan untuk dibahas apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, karena Peraturan Menteri Kehutanan ini dikeluarkan pada tahun 2012 atau setelah kemah konservasi tersebut dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan kemah konservasi tersebut juga dilakukan oleh petugas-petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon di SPTN Wil. III Sumur dan dibantu oleh Kwartir Kec. Sumur, Pandeglang dan bukan secara definitif diselenggarakan oleh Kelompok fungsional tertentu Penyuluh Kehutanan. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut yang menyebutkan secara terbatas bahwa pedoman pemanfaatan tersebut dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan bukan kelompok jabatan lainnya.

Kegiatan berikutnya dalam Bina Cinta Alam adalah Pendidikan Konservasi. Kegiatan pendidikan konservasi yang benar-benar dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional tertentu penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon sejak 2012 atau sejak dikeluarkannya

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan adalah pada 18 agustus 2014 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Karena ini merupakan satu-satunya kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan, maka perlu dicermati kesesuaian antara keduanya. Jika dilihat dari sarana dan prasarana yang digunakan, yaitu pakaian kerja, tas kerja, buku kerja, kamera digital, dan komputer jinjing, maka bisa dikatakan hanya kurang dari setengah dari sarana dan prasarana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan yang terpenuhi. Namun bukan berarti kegiatan penyuluhan tersebut gagal atau pun tidak optimal, sebab dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut tidak disebutkan bahwa setiap kegiatan penyuluhan kehutanan dalam pelaksanaannya harus menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang disebutkan. Ini berarti sarana dan prasarana tersebut bersifat opsional dan penggunaannya sesuai dengan situasi dan kondisi penyuluhan yang dilakukan. Namun yang pasti penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus ditujukan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan kehutanan, memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh kehutanan, serta untuk mengakses informasi teknologi yang berguna bagi kegiatan penyuluhan kehutanan.

Kegiatan penyuluhan pada tanggal 18 agustus tersebut telah sesuai dengan tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, hal ini dikarenakan dengan penggunaan sarana dan prasarana yang ada tersebut kegiatan penyuluhan telah terlaksana dengan baik dan lancar, materi yang diberikan terkait konservasi pun diberikan hingga akhir. Sarana dan prasarana yang ada seperti komputer jinjing juga berperan dalam memfasilitasi proses pembelajaran sasaran penyuluhan, dalam hal

ini adalah siswa-siswi SMK Negeri 3 Pandeglang. Sarana dan prasarana penyuluhan tersebut mempermudah mereka untuk mempelajari konsep-konsep konservasi yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan juga bisa difungsikan untuk mengakses informasi untuk menunjang kegiatan penyuluhan, dan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan itu sendiri.

Kegiatan Bina Cinta Alam berikutnya adalah Pembentukan dan Pembinaan Kader Konservasi. Pembentukan kader konservasi dilakukan dengan cara perekrutan terbuka atau *Open Recruitment* yang ditujukan bagi siswa-siswi sekolah yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Perekrutan ini dilakukan terhadap siswa-siswi yang juga ikut dalam kegiatan Pramuka dan kegiatan-kegiatan pencinta alam. Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, maka akan cukup sulit untuk menilai apakah kegiatan pembentukan ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, karena kegiatan pembentukan ini sifatnya yang insidental (disesuaikan dengan masa pembelajaran siswa yang ada) dan tidak memerlukan sarana dan prasarana sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Untuk pembinaan kader konservasi pun demikian, sulit untuk menilai apakah sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang ada benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembinaan tersebut, hal ini karena kegiatan pembinaan yang ada justru dilakukan oleh pihak lain dalam kegiatan-kegiatan relevan seperti kemah konservasi yang diselenggarakan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan bukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang diciptakan oleh Penyuluh Taman Nasional Ujung Kulon sendiri.

Kegiatan penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon terakhir adalah Pemberdayaan Masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Ujung

Kulon dimulai pada tahun 2009, ditinjau lagi pada 2011, dan sampai saat ini keberlanjutannya tidak menunjukkan keberhasilan. Ini ditandai dengan berhentinya kegiatan dikarenakan tidak berjalannya proses pendampingan kepada masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang telah dimulai dan dilaksanakan. Banyak permasalahan yang menyebabkan berhentinya pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon, dan ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab permasalahan dalam tulisan ini.

Sulit untuk menemukan kesesuaian kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan. Hal ini dikarenakan, *Pertama*, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan atau dilimpahkan penanganannya secara definitif kepada kelompok fungsional tertentu penyuluh kehutanan, tetapi diserahkan kepada sebuah tim yang dibentuk dari pegawai-pegawai Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Hal ini tentu tidak relevan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, karena dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini sarana dan prasarana penyuluhan hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan saja. Hal berikutnya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan pada tahun 2009 dan ditinjau lagi pada 2011, dan pada saat ini mengalami ketidakjelasan keberlanjutan kegiatannya. Artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan sebelum keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, dan akan menjadi tidak relevan jika membahas kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang ada sebelum aturan yang bersangkutan dikeluarkan.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan rumusan masalah yang pertama, yaitu terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, terlihat bahwa pelaksanaan yang ada tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hampir semua kegiatan yang ada secara intensitas dan kuantitas tidak maksimal dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Terkait dengan permasalahan dan hambatan ini, ada baiknya untuk membaginya ke dalam dua kategori penyebab, yaitu internal dan eksternal, selain itu akan dilihat dari sudut substansi apa yang menimbulkan hambatan tersebut, hambatan apa yang dirasakan atau pun ditimbulkan oleh aparat terkait yang berada dalam struktur, dan hambatan apa saja yang dirasakan oleh aparat yang muncul dari permasalahan kultur yang ada di masyarakat. Setelah diidentifikasi hambatan dan permasalahan yang ada, baru kita tentukan alternatif solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut.

1. Internal.

a. Substansi.

- 1) Aturan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang tidak memberdayakan dan mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan⁸⁰.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Firmanto Noviar S. S.Hut, M.Si (Koordinator Penyuluh Kehutanan Balai Taman Nasional Ujung Kulon) pada tanggal 29 agustus 2014, pukul 10:00, di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat, tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi pada tahun 2009, diamanatkan dan dibentuk dari petugas-petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon lintas jabatan. Tim pemberdayaan masyarakat tersebut terdiri dari petugas-petugas jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Polisi Kehutanan (Polhut), Penyuluh Kehutanan, dan jabatan fungsional lainnya.

Aturan pembentukan yang dikeluarkan ini membuat tidak adanya optimalisasi tugas, peran, dan fungsi penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Tidak hanya di pemberdayaan masyarakat saja, di bidang lain yang seharusnya menjadi ranah, kewenangan, dan tugas penyuluh kehutanan pun diserahkan kepada petugas-petugas lain. Seperti ketika adanya kegiatan pendidikan konservasi, tidak sepenuhnya kegiatan ini dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan, ada beberapa yang ditangani oleh petugas dari jabatan lain seperti Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), atau disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki petugas. Aturan-aturan yang dikeluarkan untuk menyerahkan sebuah kegiatan yang harusnya menjadi tugas penyuluh kehutanan namun diberikan kepada petugas jabatan lainnya adalah seperti dengan dikeluarkannya surat-surat perintah tugas dari pimpinan Balai Taman Nasional Ujung Kulon kepada petugas jabatan selain penyuluh kehutanan untuk melaksanakan sebuah kegiatan, yang seharusnya dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan. Inilah yang secara aturan membuat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan tidak dapat dianalisis lebih lanjut terkait penerapannya karena banyak kegiatan yang dilaksanakan bukan oleh penyuluh kehutanan, sedangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut

ditentukan secara terbatas bahwa sarana dan prasarana penyuluhan hanya bisa dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan.

b. Struktur.

- 1) Tidak adanya pendampingan, *back up*, monitoring, bimbingan dan arahan dalam pemberdayaan masyarakat⁸¹.

Hambatan utama dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah ketika program pemberdayaan masyarakat telah dimulai dan dilaksanakan, petugas yang telah diberi amanat dalam pemberdayaan masyarakat ini tidak melakukan pendampingan kepada masyarakat binaannya sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada tidak berjalan secara berkelanjutan. Padahal tujuan dari penyuluhan adalah bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada bisa terus berjalan, berkelanjutan, dan ada peningkatan kapasitas. Kegiatan pendampingan terutama diperlukan dalam memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan kegiatan usaha ke arah masyarakat yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan. *Back up*, monitoring, bimbingan, dan arahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat. Petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon tidak mem-*back up* ketika masyarakat menghadapi permasalahan, tidak memonitoring keberlangsungan kegiatan, serta tidak maksimal dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dimulai bersama.

Tidak hanya dalam pemberdayaan masyarakat, bina cinta alam pun menghadapi permasalahan dalam pendampingan, khususnya terkait dengan kader konservasi. Kegiatan kader

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mumu Muawalih (Pengendali Ekosistem Hutan dan Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Balai Taman Nasional Ujung Kulon), pada tanggal 1 september 2014, pukul 09:30, di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan.

konservasi tidak mendapat pendampingan yang baik, sehingga mengakibatkan kurangnya kegiatan-kegiatan yang mampu memperkuat kelembagaan kader konservasi tersebut. Petugas tidak memiliki inisiasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertema konservasi, seperti kemah konservasi. Kader konservasi yang ada hanya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pihak lain, seperti penyelenggaraan kemah konservasi di wilayah lain di luar Taman Nasional Ujung Kulon.

- 2) Pemasaran/marketing hasil dari pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan baik⁸².

Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah program yang ada akhir, program ini merupakan program yang berjalan terus menerus. Untuk dapat mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat efektif, kegiatan-kegiatan yang ada harus memberikan kemanfaatan secara terus menerus kepada masyarakat. Agar kemanfaatan dirasakan terus menerus, produk yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat ini perlu secara lancar dipasarkan. Banyak manfaat yang diperoleh ketika pemasaran produk berjalan lancar, tidak hanya keuntungan dari sisi ekonomis, namun juga dari sisi pengembangan jaringan usaha dan motivasi. Dari sisi ekonomis, produk yang dipasarkan secara baik akan menjamin keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Dari sisi jaringan usaha, pemasaran yang baik akan membuat produk hasil pemberdayaan masyarakat dikenal orang secara luas dan bisa menarik perhatian pihak lain untuk bekerja sama dalam pengembangan produk pemberdayaan masyarakat tersebut. Sedangkan untuk alasan motivasi, pemasaran yang baik akan memotivasi masyarakat lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena bisa menunjukkan

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Wagiah (anggota masyarakat dan kelompok binaan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Ketua Tani Hutan Mekar Indah), pada tanggal 13 juli 2014, pukul 14:00, di rumah Ketua Tani Hutan Mekar Indah, Kp Cibayoni, Kec. Sumur.

manfaat-manfaat ekonomis yang diperoleh dengan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon tidak memiliki pemasaran yang bagus, seperti tanaman obat yang telah disebutkan di atas, maupun budi daya anggrek. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kurangnya pendampingan dalam hal pemasaran. Petugas yang ada tidak mampu mencari pasaran dimana produk-produk yang dihasilkan akan dijual.

c. Kultur.

- 1) Masyarakat kurang memanfaatkan bantuan Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan⁸³.

Karena kurangnya pendampingan dan bimbingan, masyarakat tidak mampu memanfaatkan bantuan pemberdayaan masyarakat secara tepat dan berhasil guna. Banyak bantuan yang diberikan tidak mampu dikembangkan untuk keperluan jangka panjang. Contohnya ketika masyarakat diberikan bantuan hewan ternak seperti anakan kambing dan bibit ikan, pada saat-saat tertentu seperti adanya hajatan atau syukuran, bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak dapat dikembangkan lagi untuk waktu yang lebih panjang.

- 2) Belum tergalinya secara menyeluruh tentang potensi usaha ekonomi masyarakat lokal⁸⁴.

Pemberdayaan masyarakat yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon terkesan seperti dipaksakan bagi masyarakat yang

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Irawan Sugiarto, S.Hut (staff Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah III Sumur dan anggota Tim Pemberdayaan Masyarakat Balai Taman Nasional Ujung Kulon) pada tanggal 11 juli 2014, pukul 15.00, di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah III Sumur, Kec. Sumur.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mumu Muawalah (Pengendali Ekosistem Hutan dan Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Balai Taman Nasional Ujung Kulon), pada tanggal 1 september 2014, pukul 10:00, di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan.

bersangkutan, karena banyak kegiatan yang kurang berhasil diterapkan di masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan petugas yang kurang jeli melihat potensi yang harusnya dikembangkan dan masyarakat pun tidak memahami potensi seperti apa yang dimilikinya untuk dapat disesuaikan dengan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan. Masyarakat hanya melihat keuntungan ekonomis jangka pendek dari program pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa melihat potensi dan peluangnya dikemudian hari sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat tersebut.

Sebenarnya masih banyak potensi yang bisa digali dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, mengingat beragamnya latar belakang masyarakat. Di kawasan sebelah timur dan selatan Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan wilayah laut, mayoritas masyarakatnya merupakan nelayan, sedangkan di sebelah barat masyarakatnya mayoritas bertani maupun berkebun. Banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang bisa diberikan sesuai dengan potensi yang ada. Kesesuaian potensi dan bantuan yang diberikan diharapkan dapat secara utuh memberdayakan masyarakat dan mampu mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

2. Eksternal.

a. Substansi.

- 1) Tugas dan kewenangan antar penyuluh kehutanan yang saling tumpang tindih⁸⁵.

Tugas penyuluhan kehutanan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, namun juga ada dan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mumu Muawalih (Pengendali Ekosistem Hutan dan Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Balai Taman Nasional Ujung Kulon), pada tanggal 1 september 2014, pukul 10:30, di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan.

Dinas Kehutanan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Di Taman Nasional Ujung Kulon sendiri, penyuluhan kehutanan tidak hanya dilakukan oleh petugas dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon saja, namun juga dari penyuluh kehutanan yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang. Hal ini karena wilayah masyarakat yang menjadi obyek penyuluhan berada di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon, dan secara administratif masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Permasalahan akan timbul ketika terjadi tumpang tindih kegiatan penyuluhan kehutanan, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat yang sama-sama dimiliki oleh masing-masing instansi, mengingat masyarakat yang menjadi obyek penyuluhan kehutanan sama, yaitu masyarakat yang ada di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon yang secara administratif masuk ke Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten.

b. Struktur.

1) Anggaran yang kecil untuk penyuluhan kehutanan⁸⁶.

Masalah yang cukup signifikan dihadapi dalam penyuluhan kehutanan khususnya yang terkait dengan bina cinta alam (pendidikan konservasi, kemah konservasi, dan kader konservasi) adalah kecilnya dana yang dianggarkan. Dana yang dianggarkan lebih kecil dibanding dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan bina cinta alam bukan merupakan fokus utama dalam bidang konservasi. Kegiatan bina cinta alam hanya disisipkan dalam fokus pengelolaan Taman Nasional terkait dengan konservasi.

2) Kurangnya kemitraan dan jaringan kerja sama⁸⁷.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Firmanto Noviar S. S.Hut, M.Si (Koordinator Penyuluh Kehutanan Balai Taman Nasional Ujung Kulon) pada tanggal 29 agustus 2014, pukul 10:40, di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan

Program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bukan program yang hanya melibatkan masyarakat dengan petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon saja, tetapi program yang melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah, LSM, maupun Badan dan Lembaga pemerintah lainnya. Kemitraan dan jaringan kerja sama ini sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama setelah kegiatan dimulai dan dilaksanakan, dan mulai untuk proses pendampingan. Pasca dilaksanakannya sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, diperlukan campur tangan pihak lain untuk mengembangkan potensi dan hasil dari pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dengan melibatkan pihak mitra ini ditujukan agar program pemberdayaan masyarakat bisa berjalan secara berkesinambungan. Contoh hambatan dalam pemberdayaan masyarakat terkait kemitraan adalah ketika pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya yang bergerak dalam budidaya tanaman obat untuk pembuatan jamu tradisional, tidak mendapat dukungan dari Badan yang seharusnya memberikan dorongan untuk berkembang, dimana ketika tanaman obat tersebut telah dikembangkan menjadi jamu, mengalami kesulitan perijinan untuk dapat dipasarkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Kultur.

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon⁸⁷.

Rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan sulitnya informasi dan teknologi yang ada dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dampak

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nana Suhana (Penganalisis Bahan Perlindungan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah III Sumur) pada tanggal 11 juli 2014, pukul 11.00, di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah III Sumur, Kec. Sumur.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Firmanto Noviar S. S.Hut, M.Si (Koordinator Penyuluh Kehutanan Balai Taman Nasional Ujung Kulon) pada tanggal 5 september 2014, pukul 10:40, di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan.

lainnya adalah ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan yang menjadi semakin tinggi, padahal seharusnya tingkat ketergantungan ini dapat ditekan tiap tahunnya. Selain itu karena tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya kesadaran atau *awareness* yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan terhadap pendidikan konservasi dan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Rendahnya tingkat pendidikan ini bisa dilihat dari persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010.

Tabel 2. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010.

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak/Belum Tamat	28,1	30,4	29,3
SD/MI/Sederajat			
SD/MI/Sederajat	39,6	43,4	41,5
SMP/Sederajat	15,8	14,5	15,1
SMA/SMK/Sederajat	12,8	9,1	11,0
Universitas	3,7	2,6	3,2
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.

C. Alternatif Solusi atas Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon pernah memberikan solusi terkait permasalahan penyuluhan kehutanan, khususnya di bidang

pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menghidupkan kembali program pemberdayaan masyarakat yang ada, pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon mencoba mengaktifkan kembali Model Desa Konservasi (MDK) pada tahun 2012 dan 2013. Kegiatan-kegiatan MDK tersebut telah dilaksanakan Monev (monitoring dan evaluasi). Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan-kegiatan Model Desa Konservasi ternyata masih kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh:

1. Program Model Desa Konservasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum mempunyai Masterplan.
2. Pendampingan belum bersifat berkelanjutan dikarenakan petugas penyuluh belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Terhadap hambatan dan permasalahan yang ada, penulis memberikan alternatif solusi sebagai berikut:

1. Internal.
 - a. Substansi.
 - 1) Optimalisasi peran penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan kebijakan-kebijakan yang memberdayakan tenaga penyuluh.

Seperti yang disebutkan pada permasalahan terkait substansi, bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya adalah tim yang terdiri dari berbagai kelompok jabatan, dan tidak secara spesifik diserahkan kepada penyuluh kehutanan. Hal ini lah yang menyebabkan tidak maksimalnya tugas, peran, dan fungsi penyuluh kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon. Ke depannya diharapkan untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan seperti bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat bisa sepenuhnya diserahkan pelaksanaannya kepada penyuluh kehutanan dengan mengeluarkan kebijakan yang relevan, seperti memberikan atau mengeluarkan Surat Perintah Tugas atau

Surat Keputusan terkait kegiatan penyuluhan kehutanan kepada Pejabat Penyuluh Kehutanan.

b. Struktur.

- 1) Perlu adanya pendampingan untuk setiap kegiatan penyuluhan kehutanan.

Proses pendampingan mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan penyuluhan kehutanan, proses pendampingan yang selama ini dijalankan masih terasa kurang, peran petugas lapangan tidak berjalan maksimal. Peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan kegiatan usaha masyarakat berbasis kehutanan harus dilaksanakan secara terus menerus sejalan dengan tingkat produktifitas, jenis aktifitas dan sistem kegiatan usaha. Pendampingan membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja secara totalitas lekat dengan masyarakat. Pendamping harus mampu membangun jiwa dan raga masyarakat, mereka bergerak di level terbawah, mereka tinggal dan akrab dengan masyarakat dalam kesehariannya, sehingga mampu mengetahui adat kebiasaan, dan mengerti akan kelebihan dan kekurangan masyarakat di lingkungan tersebut, sehingga akhirnya mereka mampu menilai dan memperhitungkan apa yang sejatinya paling dibutuhkan oleh Masyarakat (*Needs Assessment*).

Tahap awal pendampingan masyarakat adalah penyadaran akan hak dan kewajibannya, jika masyarakat mulai sadar dan tergerak untuk berupaya bersama-sama, maka mereka membutuhkan pendampingan, sekaligus fasilitasi untuk mengetahui potensi dan kendala yang ada pada mereka dan lingkungan sekitarnya. Upaya pendampingan dan fasilitasi pemahaman potensi dan kendala (analisa peluang, ancaman, hambatan dan tantangan) harus mampu membawa masyarakat yang didampingi tetap selalu termotivasi dan tetap konsisten. Oleh karena itu upaya memotivasi masyarakat dengan selalu

mempertahankan antusiasme mereka menjadi kemampuan paling penting yang harus dimiliki oleh para pendamping masyarakat atau fasilitator. Karena tanpa antusiasme masyarakat sendiri, maka keterlibatan masyarakat dalam rangka kegiatan pemberdayaan hanyalah menjadi suatu bentuk partisipasi dan mobilisasi serta rekayasa pemberdayaan semata.

Tahap selanjutnya adalah mencari dan menyusun strategi pemenuhan kebutuhan dengan membangkitkan kebersamaan, berpartisipasi aktif sehingga muncul inisiatif-inisiatif untuk melakukan swadaya dalam merealisasi langkah-langkah pemenuhan kebutuhan. Dalam upaya ini pendamping masyarakat atau penyuluh kehutanan tidak hanya dituntut memfasilitasi saja, namun juga dituntut untuk mampu mengadvokasi, memediasi masyarakat dengan pihak lain, yang pemikiran, keahlian dan tenaganya dibutuhkan masyarakat.

Tidak hanya di pemberdayaan masyarakat, upaya pendampingan yang baik juga harus ada di kegiatan-kegiatan bina cinta alam, seperti pendidikan konservasi, kemah konservasi, dan kader konservasi. Pendampingan untuk kegiatan kader konservasi diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan arahan dan pedoman demi keberlanjutan proses pengkaderan yang tidak hanya sekali dibentuk, namun akan selalu didampingi untuk jangka waktu yang lebih lama dalam kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.

c. Kultur.

- 1) Memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

Penyuluh Kehutanan hendaknya mampu mengelola informasi dan pesan yang akan disampaikan bukan hanya kepada masyarakat akan tetapi juga kepada pemangku kepentingan atau

stakeholders (masyarakat, mitra pemerintah dan dunia usaha). Sebagai seorang *communication manager*, informasi mengenai fungsi kawasan hutan, manfaat dan gangguan terhadap kawasan hutan serta program yang sedang dijalankan harus dikemas secara baik, melalui media penyampaian pesan yang bisa diterima dan dipahami secara mudah oleh stakeholder terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan upaya konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

Seorang penyuluh kehutanan harus mampu menguasai teknik komunikasi dengan baik. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Mengelola informasi bagi seorang penyuluh artinya juga harus mampu menangkap 'pesan' yang disampaikan pemangku kepentingan; menerjemahkan kepentingan dan informasi dari pemangku kepentingan. Informasi yang dikumpulkan ini kemudian disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis kawasan untuk didiskusikan oleh tim teknis dan menjadi landasan rencana pengelolaan kawasan. Hasil kerja tim teknis yang dapat berupa program atau inisiatif baru yang kemudian disampaikan kembali kepada stakeholder atau pemangku kepentingan agar mendapatkan penerimaan dan dukungan.

Dinamika dan kondisi di lapangan sangat mempengaruhi pesan atau informasi yang disampaikan, untuk itu penyuluh kehutanan sebagai penyampai harus mampu memanfaatkan komunitas masyarakat yang sudah ada atau membentuk komunitas masyarakat baru, untuk keberlanjutan adopsi produk sosial/ perubahan yang ditawarkan. Di sinilah peran inti dari seorang penyuluh kehutanan yang dimiliki Ditjen PHKA, dalam membantu mengimplementasikan kebijakan Kementerian Kehutanan. Penyuluh Kehutanan tidak hanya berperan sebagai ujung tombak

pra kondisi di lapangan (sosialisasi, penyuluhan), tetapi juga berperan pada saat implementasi program dilaksanakan. Oleh karena itu, Penyuluh Kehutanan harus mampu menciptakan teknik dan metoda pemasaran pesan konservasi yang tepat, menciptakan lingkungan yang memberdayakan serta mampu mengatur strategi negosiasi, pendampingan dan komunikasi yang tepat sasaran, agar stakeholders (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha) mau berubah perilakunya dan mengadopsi atau “membeli” produk konservasi yang diinginkan.

2. Eksternal.

a. Substansi.

- 1) Harmonisasi tugas dan wewenang antar penyuluh kehutanan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Permasalahan substansial yang dihadapi oleh penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon adalah kenyataan bahwa tugas dan wewenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya dimiliki olehnya, namun juga ada penyuluh di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Untuk itu perlu adanya harmonisasi tugas dan kewenangan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tidak saling tumpang tindih mengingat masyarakat obyek penyuluhan yang sama. Koordinasi antar instansi yang melakukan penyuluhan kehutanan mutlak diperlukan. Hal ini selain untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, juga untuk memperlancar tujuan penyuluhan dan hanya fokus bagaimana masyarakat yang menjadi obyek penyuluhan bisa diberdayakan secara berhasilguna.

b. Struktur.

- 1) Peningkatan anggaran untuk penyuluhan kehutanan.

Peran dan fungsi penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon harus ditingkatkan guna keberlanjutan program-program penyuluhan kehutanan yang sudah ada, tidak hanya

penguatan secara kelembagaan dengan menghidupkan kembali peran, fungsi, dan tugas penyuluh melalui kebijakan-kebijakan penugasan kepenyuluhan, namun juga memperkuat dari sisi anggaran. Dalam kegiatan penyuluhan kehutanan, kegiatan yang belum didukung dengan pendanaan yang optimal adalah kegiatan bina cinta alam, yang di dalamnya terdapat kegiatan kemah konservasi, kader konservasi, dan pendidikan konservasi. Kegiatan bina cinta alam ini hanya menjadi kegiatan sisipan dari kegiatan konservasi secara keseluruhan. Kedepannya perlu meningkatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan bina cinta alam, dan perlu adanya perubahan *mindset* pemangku kepentingan agar kegiatan bina cinta alam tidak lagi menjadi kegiatan sisipan dalam upaya konservasi, dan agar mendapat perhatian lebih dalam penyusunan rencana kegiatan Taman Nasional di tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan bina cinta alam sangat perlu untuk ditingkatkan pendanaannya guna menjamin keberlangsungan dan keberlanjutannya, hal ini karena kegiatan bina cinta alam merupakan kegiatan untuk proses pengkaderan generasi muda untuk peduli dengan Taman Nasional Ujung Kulon dan upaya konservasi yang dilaksanakan di Taman Nasional ini. Ini akan sangat banyak memberikan kontribusi dikemudian hari karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan tekanan dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Ujung Kulon akan semakin berkurang dan masyarakat juga diharapkan sadar akan upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh Taman Nasional Ujung Kulon, dan diharapkan mampu untuk terlibat aktif di dalamnya.

2) Membangun jaringan kerja guna pemasaran yang lebih baik.

Program penyuluhan kehutanan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kegiatan ini harus didukung oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat (tidak

hanya Kementerian Kehutanan), pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, maupun masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu lah diperlukan jaringan kerja sama lintas sektor yang mampu memberikan kontribusi kepada setiap kegiatan penyuluhan kehutanan, khususnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kerjasama yang paling dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon adalah kerjasama-kerjasama dengan pihak ketiga untuk proses pemasaran atau pendayagunaan hasil pemberdayaan masyarakat secara langsung, hal ini ditujukan agar program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tetap eksis dan berkelanjutan dalam kebermanfaatan.

c. Kultur.

- 1) Identifikasi potensi-potensi usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dengan melibatkan pihak-pihak lain.

Usaha-usaha ekonomi masyarakat yang dijalankan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan jenis usaha apa yang cocok dijalankan dalam satu masyarakat, mulai dari penerimaan masyarakat, kemampuan dan keahlian masyarakat untuk mengelola, dukungan dari kelompok masyarakat lain, sampai dengan kesesuaian usaha ekonomi yang akan dijalankan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Upaya identifikasi ini selayaknya menjadi perhatian petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan usaha masyarakat ke depannya, mengingat kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang ada tidak

berjalan secara optimal karena kurangnya kemampuan identifikasi potensi masyarakat dan usaha yang akan dijalankan di awal program pemberdayaan masyarakat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

1. Pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012, namun terdapat beberapa catatan permasalahan terkait kesesuaian tersebut. Hal ini karena sedikitnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan, bahkan hampir tidak ada dalam kurun waktu dua tahun terakhir, padahal Permenhut tersebut baru ada pada tahun 2012, selain itu Permenhut ini juga secara limitatif membatasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan yang hanya bisa dilakukan oleh penyuluh saja, padahal kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon banyak yang diserahkan kepada pejabat fungsional selain penyuluh kehutanan. Hanya ada satu kegiatan yang bisa dibahas kesesuaiannya, yaitu kegiatan pendidikan konservasi kepada siswa-siswi SMKN 3 Pandeglang. Kegiatan tersebut menurut penulis telah sesuai dengan Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012, meski pun hanya beberapa sarana dan prasarana yang digunakan namun tetap memenuhi tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana yang disebutkan dalam Permenhut tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon terkait Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan secara garis besar dibagi dalam dua kategori berdasarkan penyebabnya, yaitu internal dan eksternal, di dalamnya dibagi lagi berdasarkan penyebab secara substansi, struktur, dan kultur. Hambatan internal dalam hal substansi adalah adanya aturan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang tidak memberdayakan dan mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan. Terkait struktur, hambatan yang ditemui *pertama*, tidak adanya pendampingan,

back up, monitoring, bimbingan dan arahan dalam pemberdayaan masyarakat, dan *Kedua*, Pemasaran/marketing hasil dari pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan baik. Sedangkan untuk hambatan kultur adalah Masyarakat kurang memanfaatkan bantuan Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan, serta belum tergalinya secara menyeluruh tentang potensi usaha ekonomi masyarakat lokal. Untuk hambatan eksternal, dari sisi substansi hambatan yang ditemui adalah tugas dan kewenangan antar penyuluh kehutanan yang saling tumpang tindih. Dari sisi struktur, hambatannya adalah anggaran yang kecil untuk penyuluhan kehutanan, dan kurangnya kemitraan dan jaringan kerja sama. Sedangkan dari sisi kultur, hambatan yang ditemui adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

3. Alternatif solusi yang penulis tawarkan, dibagi dalam kategori berikut. Secara internal dalam hal substansi adalah Optimalisasi peran penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan kebijakan-kebijakan yang memberdayakan tenaga penyuluh. Untuk struktur, alternatif yang bisa penulis tawarkan adalah perlu adanya pendampingan untuk setiap kegiatan penyuluhan kehutanan. Sedangkan untuk kultur, alternatif solusi berupa pemberian informasi, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon, adalah hal yang bisa ditawarkan. Sedangkan secara eksternal dalam hal substansi, solusi yang bisa diberikan adalah harmonisasi tugas dan wewenang antar penyuluh kehutanan agar tidak terjadi tumpang tindih. Peningkatan anggaran untuk penyuluhan kehutanan serta membangun jaringan kerja guna pemasaran yang lebih baik merupakan alternatif solusi terkait struktur yang bisa ditawarkan. Sedangkan untuk kultur, hal yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan identifikasi potensi-potensi usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dengan melibatkan pihak-pihak lain.

B. Implikasi.

Implikasi dari simpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012 dengan kebijakan dan kegiatan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon cukup sulit untuk dibahas kesesuaiannya, karena kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan yang tidak secara kelembagaan diserahkan kepada pejabat penyuluh kehutanan, serta akibat minimnya kegiatan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam dua tahun terakhir atau setelah keluarnya Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012. Minimnya kegiatan penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon akan membuat sulitnya peraturan perundang-undangan seperti Permenhut RI No: P.35/MENHUT-II/2012 diterapkan dan dikaji keberhasilannya, implikasi lainnya adalah akan adanya perubahan atau penyempurnaan aturan terkait kebijakan penyuluhan kehutanan agar lebih mudah untuk dikaji.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon antara lain dari sisi substansi atau aturan-aturan terkait pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dari sisi struktur atau aparat yang melaksanakan penyuluhan kehutanan, dan dari sisi kultur atau masyarakat sebagai obyek kegiatan akan menyebabkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon terhambat. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, karena akan menghambat proses pemberdayaan masyarakat dan akan berimplikasi bagi kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagi Taman Nasional Ujung Kulon, jika hambatan-hambatan ini tidak bisa teratasi maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi yang seharusnya memberdayakannya, dan hal ini akan berimplikasi panjang, seperti timbulnya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan yang akan lebih tinggi, serta munculnya pelanggaran-pelanggaran di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, seperti penebangan ilegal, penjarahan hasil hutan,

maupun penggunaan kawasan hutan yang dapat merusak kelestarian ekosistem, dan bagi generasi muda yang seharusnya dipersiapkan menjadi pelaku utama upaya konservasi, hambatan-hambatan yang berkaitan dengan proses pendidikan konservasi akan mengakibatkan minimnya informasi terkait konservasi dan berimplikasi pada ketidaktahuan akan bagaimana mengelola kawasan konservasi sehingga bisa menjadi permasalahan di kemudian hari. Implikasi berikutnya adalah penyempurnaan strategi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan di kemudian hari.

3. Alternatif-alternatif solusi yang ditawarkan penulis akan bisa setidaknya mengatasi permasalahan serta hambatan yang ada serta mampu merubah *mindset* masyarakat terhadap kebijakan penyuluhan kehutanan yang selama ini telah dilakukan. Alternatif solusi dari sisi substansi, struktur, dan kultur akan menghasilkan kebijakan penyuluhan kehutanan yang lebih komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan. Alternatif solusi yang ada perlu dilaksanakan dan menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan, mulai dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri. Alternatif solusi yang ada, apabila bisa dilaksanakan dengan baik, menurut penulis akan berimplikasi pada peningkatan mutu penyuluhan kehutanan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

C. Saran.

1. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon adalah sulitnya mengkaji kesesuaiannya dengan aturan-aturan yang relevan, hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan adalah karena kebijakan yang tidak mengoptimalkan peran penyuluh dan minimnya kegiatan penyuluhan, untuk itu diharapkan

kepada pemangku kepentingan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon secara kuantitas dan intensitasnya agar dikemudian hari lebih mudah untuk dilakukan kajian-kajian hukum seperti misalnya terkait kesesuaian antara kebijakan penyuluhan kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan. Untuk mencapainya perlu optimalisasi peran penyuluh kehutanan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan kebijakan-kebijakan yang memberdayakan tenaga penyuluh seperti pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kewenangan penyuluh kehutanan, dan diharapkan berjalan secara intensif.

2. Semua pihak, khususnya pemangku kepentingan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon harus peka dan *aware* terhadap semua hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Hal ini agar pengambilan keputusan dan kebijakan cepat dilakukan guna meminimalisir kerugian-kerugian yang timbul akibat ketidaktanggapan aparat atas hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Pada dasarnya hambatan-hambatan yang timbul merupakan akibat dari kurangnya informasi, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat, untuk itu penyuluh kehutanan perlu memberikan informasi yang jelas dan aplikatif, pemahaman yang mudah diterima oleh masyarakat, serta pengetahuan yang bermanfaat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan upaya konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.
3. Pemangku kepentingan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon harus bisa melaksanakan alternatif solusi yang diberikan guna mengatasi hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan yang ada. Alternatif solusi ini diharapkan tidak hanya menjadi perhatian pemangku kepentingan di Balai Taman Nasional Ujung Kulon saja, namun semua pihak yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan di Taman

Nasional Ujung Kulon seperti Pemerintah Pusat (tidak hanya Kementerian Kehutanan), Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan alternatif solusi tersebut, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan upaya pendampingan secara komprehensif terhadap semua kegiatan penyuluhan kehutanan di Taman Nasional Ujung Kulon, seperti pendampingan masyarakat, maupun pendampingan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya konservasi. Pendampingan tersebut tidak mutlak menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Ujung Kulon, namun melibatkan pihak-pihak seperti yang telah disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono. 1997. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bettinger P, Boston K, Siry JP, Grebner DL. 2009. *Forest Mangement and Planning*. Amsterdam: Elsevier.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Burhan Ashofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Efendi Onong. 1984. *Ilmu komunikasi, teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Hazanal Arifin. 2004. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan* (edisi ketiga). Jakarta: Departemen Kehutanan.
- HB. Soetopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Hidayat. 2003. *Penyuluhan kehutanan. Akan Dibawa Kemana*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kehutanan.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasapoetra. 2005. *Konservasi Tanah Dan Air*. Bandung: Rineke Cipta.
- L.J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lawrence M. Friedman. 1969. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lexy J. Maleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. 2005. *Theory Of Human Communication*. 8 ed. Canada: Wadsworth.
- Muljono. 2011. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Kehutanan*. Jakarta: Badan Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setiono. 2010. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 2000. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Spurr, S. H., and B. V. Barnes. 1980. *Forest ecology*, 3d ed edition. New York: John Wiley and Sons Inc.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII. Yogyakarta: Kanisius.

Wiharta. M. dkk, 1997. *Buku Pintar Penyuluh Kehutanan*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan.

Jurnal:

COX, E.J., Rose, D.T. & Lewis, J.M. 1997. Using laboratory culture experiments to explore the ecological tolerances of benthic diatoms. *Phycologia* 36(4) (Supplement).

Fadhilah. 2007. Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, *Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2007*.

Hobbs, R. J. and Norton, D.A. 1996. Towards a conceptual framework for restoration ecology. *Restoration Ecology* 4(2).

Iskandar, Hasan Almutahar, dan M. Sabran. 2012. Kajian Sosiologis terhadap Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013*.

Kolb, T., M. Wagner, and W. Convington. 1994. Concepts of forest health. *Journal of Forestry* 92.

Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*. Volume 6 Nomor 1 April.

- Tjipto Atmoko. 2010. Partisipasi Publik (*Public Participation*) dalam Konsep Pembangunan untuk Semua (*Development for All*). *Jurnal Sekretariat Negara RI*. No.16 Mei 2010. Jakarta.
- Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. 2004. Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. *Ecology and Society* 9(2): 5.
- Yuzar Mat Karl. 2005. Filosof, Pembuat Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 8 No. I Desember 2005. Sumedang.

Internet:

- Balai Taman Nasional Ujung Kulon. *Kemah Konservasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun 2011*. Diakses 15 agustus 2014, 15.52. <http://www.ujungkulon.org/berita/159-kemah-konservasi>.
- Balai Taman Nasional Ujung Kulon. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Model Desa Konservasi di Desa Tamanjaya*. diakses 23 agustus 2014, pukul 12:15. <http://www.ujungkulon.org/berita/161-model-desa-konservasi>.
- Danang D Cahyadi. *Hutan Indonesia: Kekayaan dan Kompleksitas Masalah*. Bogor - 22 Maret 2014, <http://www.greenpeace.org/>
- IPKINDO. *Penyuluhan Kehutanan*. diakses 23 April 2014, <https://www.facebook.com/pages/Penyuluhan-Kehutanan/>
- Pusat Informasi Kehutanan. *Model Desa Konservasi (MDK) Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi* (Siaran Pers Nomor: 62/PIK-1/2009). Diakses 23 agustus 2014, pukul 12:21. <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/5232>.

The World Bank. *Pengelolaan Hutan bagi Semua: Indonesia Policy Briefs - Ide-Ide Program 100 Hari*. diakses 23 April 2014, <http://siteresources.worldbank.org/>

Materi Pendukung lain:

Djoko Setiono. *Pendidikan Konservasi*, Materi Pendidikan Konservasi Alam bagi Guru Sekolah Dasar di Sekitar Balai Taman Nasional Alas Purwo Angkatan 26 Banyuwangi, 18-19 Juli 2011.

Pedoman Pembentukan Kader Konservasi. 2006. Bogor: Dirjen PHKA.

Pedoman Pembinaan Kader Konservasi. 2009. Bogor: Dirjen PHKA.

Modul Diklat Komunikasi dalam Penyuluhan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Bogor, Desember 2012.

Rencana Kerja (RENJA) Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun 2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.

Statistik Balai Taman Nasional Ujung Kulon. 2010.